

**JENDERAL FEISAL TANJUNG: PANGLIMA ABRI
YANG MEMPERERAT HUBUNGAN ABRI
DENGAN GOLONGAN ISLAM (1993-1998)**



Sufila Iswanti

4415091382

Skripsi Ditulis Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2016**

ABSTRAK

Sufila Iswanti. Panglima TNI Jenderal Feisal Tanjung: Mempererat Hubungan ABRI dengan Golongan Islam (1993-1998). Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kiprah Jenderal Feisal Tanjung sebagai sosok Panglima ABRI yang mempererat hubungan antara ABRI dengan golongan Islam antara tahun 1993-1998. Batas awal penelitian pada tahun 1993 adalah momen dimana Feisal Tanjung diangkat menjadi panglima ABRI oleh presiden Republik Indonesia ketika itu yaitu Soeharto dalam decade akhir pemerintahannya. Sedangkan batasan akhir yang peneliti ambil yakni tahun 1998 adalah tahun ketika Feisal Tanjung menyelesaikan jabatannya sebagai Panglima ABRI dan ketika itu pula Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Sebagai kajian sejarah, hasil penelitian ini dipaparkan dalam bentuk deskriptif naratif. Penelitian ini menggunakan sumber tertulis yang berupa biografi sosok Feisal Tanjung dan kumpulan ceramah-ceramahnya dalam periode ketika Feisal menjadi Panglima ABRI dan juga sumber-sumber lain yang relevan dengannya.

Feisal yang berlatarbelakang keluarga berfaham Muhammadiyah tertarik pada dunia militer karena masa kecilnya tinggal di pantai Sibolga yang merupakan salah satu pusat militer Indonesia pada masa revolusi. Setelah masuk AMN, Karier Feisal Tanjung cukup bagus dalam jenjang kemiliteran dan ia semakin cemerlang ketika dipilih menjadi Panglima ABRI ditengah kondisi politik Orde Baru yang dinamis. Pemilihan sosok Feisal dinilai pengamat politik sebagai salah satu upaya pemerintah Orde Baru dalam mengubah citranya dimata golongan Islam dimana sebelumnya ABRI dinilai kurang bersahabat dengan keterlibatannya dalam beberapa peristiwa yang bersentuhan dengan golongan Islam.

Pada akhir tahun 1980-an sempat terjadi 'isu' friksional terutama dalam matra Angkatan Darat tentang adanya golongan ABRI Hijau dan ABRI merah putih. Dalam

periode tersebut sosok Feisal yang terpilih sebagai Panglima ABRI dinilai merupakan perpindahan haluan pemerintah Orde Baru yang kemudian lebih ke pencitraan Islamis, dimana pengaruh Moerdani mulai diminimalisir dalam institusi ABRI.

Dalam kariernya sebagai Panglima ABRI itu pula Feisal melakukan upaya-upaya perbaikan hubungan dengan golongan-golongan Islam, baik secara institusional maupun secara kultural. Baik ke dalam institusi ABRI-nya maupun pada hubungan ABRI dengan organisasi-organisasi keislaman pada masa itu. Seperti upaya pembiasaan salam ke sesama tentara, mengisi ceramah-ceramah di masjid, melakukan lobi ke tokoh-tokoh Islam dan sebagainya.

Setelah berakhir masa jabatannya sebagai Panglima ABRI pun tidak lantas berakhir pula karier Feisal di dunia Politik. Ia sempat diangkat beberapa kali menjadi menteri hingga akhirnya ia pension dan wafat pada awal tahun 2013. Selama menjadi Panglima ABRI itulah ia dianggap sebagai sosok yang mempererat hubungan ABRI dengan golongan Islam.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



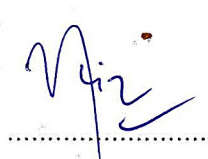
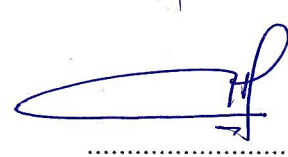

Penanggung Jawab / Dekan Fakultas Sosial
Universitas Negeri Jakarta



Drs. Muhammad Zid, M.Si.

NIP. 19630412 199403 1 002

TIM PENGUJI

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Drs. Abrar, M.Hum. NIP. 19611028 198703 1 004 Ketua		17/2 2016
2.	Dra. Ratu Husmiati, M.Hum. NIP. 19630707 199003 2 002 Sekretaris		17/2 2016
3.	Kurniawati, S.Pd, M.Si. NIP. 1977 0820 200501 2 002 Penguji Ahli		17/2 2016
4.	Dr. Abdul Syukur, M.Hum. NIP. 19691010 200501 1 002 Dosen Pembimbing I		17/2 2016
5.	Nur'aeni Marta, M.Hum. NIP. 19710922 200112 2 001 Dosen Pembimbing II		17/2 2016

Tanggal Lulus: 10 Februari 2016

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (ahli madya, sarjana, magister dan/atau dokter) baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan hasil dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya yang berlaku di PerguruanTinggi ini.

Jakarta, 15 Februari 2016

Yang membuat pernyataan,

(Sufila Iswanti)

NIM. 4415091382

MOTO PERSEMBAHAN

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”

-Nabi Muhammad SAW-

“Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja”

-Buya Hamka-

Skripsi ini Saya persembahkan untuk orang-orang tercinta:
orangtua, suami, saudara-saudara juga para pendidikku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, Rabb semesta Alam, yang dengan karuniaNya penulis menyelesaikan amanah akademik ini. Sebuah karya tulis yang masih jauh dari sempurna, namun semoga bermanfaat bagi lain. *Aamiin.*

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah pada Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Jakarta.

Dipertengahan penulisan skripsi ini, penulis sempat terseret rasa malas dan juga pesimis. Tapi melalui banyak jalan dan skenario indahNya ternyata Allah senantiasa mencurahkan kasih sayang dan juga pertolongan, yang tentunya banyak andil dari munajat-munajat orang yang tulus membantu penulis. Hingga akhirnya skripsi ini selesai dan menjadi sebuah kesenangan tersendiri bagi penulis. Sebuah karunia diantara karunia-karunia indah dariNya.

Selama proses penulisannya, peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Semua keluarga penulis; orangtua; Mama, Bapak, Ayah dan Mamah. Suami ('Pak Hudan'), kakak-kakak (Kang Iyo, Kang Johan dan 'pasukan bawel'-nya, teh Kiki, Teh Janah) dan adik-adik penulis (Esa, Ai) yang banyak membantu dengan segala caranya dan mungkin saja sempat dibuat zhalim karena lamanya penulis menyelesaikan amanah akademik ini. Terima kasih ya untuk kesabaran dan pengertiannya.
2. Pembimbing I sekaligus Kaprodi Pendidikan Sejarah, Dr. Abdul Syukur, M.Hum., terima kasih atas semua bimbingan dan kesabarannya, bantuannya, juga doa-doanya ya pak. Juga untuk Bu Nur'aeni Martha, M.Hum. sebagai pembimbing II, terima kasih banyak atas segalanya. Pak Abrar, M.Hum. sebagai ketua sidang, Bu Ratu husmiati, M.Hum. sebagai sekretaris sidang, dan Bu Kurniawati, S.Pd., M.Si. sebagai penguji ahli dalam sidang skripsi. Juga

untuk para dosen Sejarah yang sering memberikan ide dan masukannya, yang telah menjadi pendidik bagi penulis selama di Sejarah; Pak Sugeng, Pak Adi, Bu Sri Martini, Pak Hum, Ayah (Pak Nurzengky), PakIsnu, Pak Hasmi dan semuanya, terimakasih. Beruntung rasanya Allah mengenalkan penulis dengan sosok kalian.

3. Dra. Corry Iriani R, M.Pd. selaku Pembimbing Akademis peneliti selama menyelesaikan perkuliahan.
4. Keluarga Besar Sejarah FIS UNJ, untuk anak-anak kelas seperjuangan, Siti, Catur, Isal, kakak-kakak yang sudah banyak memberi data dan idenya. Anak-anak Sejarah 2009 reg, nonreg dan parwis. Teman-teman BEMJ Sejarah, BEMFIS 2012, BEM UNJ 2013, KPSDM dan para Bidadagrinya, teman-teman ICA dan pasukannya. Semoga terus terjaga silaturahmi kita. Perjuangan kita ternyata belum usai ya, semoga selalu bisa saling mendoakan. *Aamiin*.
5. Pihak Mabes, perpustakaan dan lainnya yang sering membantu penulis dalam mencari sumber, terima kasih ya, maaf sering mengacak-acak koleksinya. Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang membantu dengan segala caranya, baik dukungan moril dan materil, munajat-munajat heningnya. Mungkin tidak semuanya tertulis satu persatu. Semoga mendapat balasan terbaik dari Allah SWT dan diberkahi setiap amalannya. *Aamiin*.

Terakhir, karena karya ini masih jauh dari sempurna, semoga kelak akan ada yang memperbaiki, mengoreksi jika ada kekeliruan, dll. agar bisa lebih bermanfaat. *Aamiin*.

Salam sayang selalu. Sufila.

Depok, 11 Februari 2016

S.I.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Metode dan Sumber Penelitian.....	9
BAB II LATAR BELAKANG KEHIDUPAN FEISAL TANJUNG	
A. Sosial-Budaya.....	12
B. Ekonomi.....	20
C. Pendidikan.....	22
D. Proses Menjadi Taruna.....	24
E. Rekam Jejak Karier Militer Feisal Tanjung.....	26
BAB III DINAMIKA HUBUNGAN ABRI DENGAN GOLONGAN ISLAM	
A. Tentara Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan.....	29
B. Hubungan ABRI dengan Golongan Islam Hingga Awal Tahun 1990-an.....	36
C. Istilah ABRI Hijau dan ABRI Merah Putih.....	47
D. Feisal Tanjung dan Pandangannya terhadap hubungan ABRI dengan Golongan Islam.....	55

BAB IV PANGlima ABRI Jendral Feisal Tanjung dalam Mempererat Hubungan ABRI dengan Golongan Islam (1993-1998)	
A. Perubahan Internal ABRI di bawah Kepemimpinan Feisal.....	59
i. Perubahan Kultural.....	59
ii. Perubahan Struktural.....	61
B. Upaya Mempererat Hubungan terhadap Ormas-Ormas Islam.....	62
C. Militer dan ICMI, sebuah hubungan yang harmonis.....	63
BAB V KESIMPULAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
RIWAYAT HIDUP.....	78

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sebelum tahun 1999 ABRI terdiri dari AD, AU, AL dan Polisi. Namun setelah 1999 kepolisian terpisah dari ABRI, dan sebutan ABRI diubah menjadi TNI.
AD	: Angkatan Darat
AL	: Angkatan Laut
Asops Kas Kostrad	: Asisten Operasi Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
AU	: Angkatan Udara
BAIS	: Badan Intelijen Strategis
BAKIN	: Badan Koordinasi Intelijen Negara
Banpur	: Bantuan Tempur
Batalyon	: Kelompok tentara yang terdiri dari 750 sampai dengan 1000 personel
BIA	: Badan Intelijen ABRI
Brigade	: Kelompok tentara yang terdiri dari beberapa batalyon atau resimen
Danki	: Komandan Kompi
Danton	: Komandan Peleton
Dan Brigif Linud	: Koman dan Brigade Infanteri Lintas Udara
Dangrup	: Komandan Grup
Dan Pusenif	: Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri

Denpur	: Detasemen Tempur
Denter	: Detasemen Teritorial
Detasemen	: Satuan tentara yang berjumlah sekitar 500 personil
Golongan islam	: Merupakan sebutan untuk sekelompok kaum Islamis baik secara politisk atau yang masih tradisinal dalam hal ini biasanya orang-orang pesantren dan pedesaan
GOM	: Gerakan Operasi Merdeka
ICCS G IV	: <i>International Commission of Control and Supervision Garuda IV</i>
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
Kasum	: Kepala Staf Umum
Kas Brigif Linud	: Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara
Kas Kopus Linud	: Kepala Staf Komando Pusat Lintas Udara
Kavaleri	: Jenis Pasukan yang menggunakan kendaraan tempur
Kodam	: Komando Daerah Militer
Kompi	: Kelompok tentara yang terdiri dari 90 sampai 150 personil
Kopassus	: Komando Pasukan Khusus
Koramil	: Komando Rayon Militer
Korem	: Komando Resort Militer
KOSTRAD	: Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
KSAD	: Kepala Staf Angkatan Darat
KSAU	: Kepala Staf Angkatan Udara

Kultural	: Aktivitas manusia yang berhubungan dengan budaya. Bersifat lebih kepada hal kebiasaan masyarakat, bukan sesuatu yang bersifat struktural
Letjen	: Letnan Jenderal
Letkol	: Letnan Kolonel
Masyarakat paguyuban	: Pola masyarakat yang ditandai dengan hubungan anggota-anggotanya bersifat pribadi, sehingga menimbulkan ikatan yang sangat mendalam dan batiniah, misalnya pola kehidupan masyarakat pertanian umumnya bersifat komunal yang ditandai dengan ciri-ciri masyarakat yang homogen, hubungan sosialnya bersifat personal, saling mengenal, serta adanya kedekatan hubungan yang lebih intim
Masyarakat patembayan	: Masyarakat yang kehidupan anggotanya lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan, serta memperhitungkan untung rugi
Menkopolkam	: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
Orde Baru	: Sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998
Orde Lama	: Sebutan bagi orde pemerintahan sebelum orde baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yang ditandai dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin

di bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral orde lama yaitu sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Pangdam	: Panglima Kodam
Pangkopur Linud	: Panglima Komando Tempur Lintas Udara
Perwira	: Pangkat dalam angkatan bersenjata Indonesia mulai dari Letnan Dua hingga Jenderal
PNI	: Partai Nasional Indonesia
Purn.	: Purnawirawan
Resimen	: Kelompok tentara yang terdiri dari beberapa batalyon
Rezim	: Serangkaian peraturan, baik formal (misalnya, Konstitusi) dan informal (hukum adat, norma-norma budaya atau sosial, dll) yang mengatur pelaksanaan suatu pemerintahan dan interaksinya dengan ekonomi dan masyarakat
RMS	: Republik Maluku Selatan
RPKAD	: Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat
Satgas	: Satuan Tugas. Kelompok pelaksana yang dibentuk untuk melakukan tugas tertentu dalam sebuah operasi, seperti Satgas Laut, Satgas Amfibi
SDI	: Sarekat Dagang Islam
Seskoad	: Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat
SL	: Satya Lencana. Yaitu tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada PNS sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara

SR : Sekolah Rakyat

TNI : Tentara Nasional Indonesia

Zeni : Genius (Bahasa Perancis), artinya pintar atau cerdas.
Jenis pasukan yang bertugas membantu
merehabilitasi suatu wilayah akibat operasi tempur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Berbicara pemerintahan atau rezim seringkali tidak dapat terlepas dari pembicaraan mengenai militer. Dalam hal ini militer seringkali dijadikan sebagai alat politik penguat kekuasaan pemerintah, namun di sisi lain militer jugalah yang terkadang menjatuhkan sebuah rezim pemerintahan. Itulah sebabnya militer selalu menjadi pertimbangan dan perhatian khusus para penguasa sebagai salah satu penjamin terhadap kestabilan Negara.

Oleh karenanya, sejak zaman Orde Lama, Orde Baru hingga saat ini, jabatan kemiliteran yang strategis selalu diduduki oleh orang-orang yang secara umum tidak berseberangan dengan pemerintah. Jika pejabat militernya diperkirakan sudah tidak loyal lagi dengan penguasa maka pasti segera dicopot dengan berbagai cara sebagaimana kasus A.H. Nasution dan beberapa pejabat zaman Orde Baru. Orde Baru yang pada awalnya berkonfrontasi dengan kalangan Islam pun memilih pejabat-pejabat militer yang berlatar belakang anti Islam¹.

Pada kasus A.H. Nasution misalnya. dimana pasca peristiwa 17 Oktober 1952, Nasution sempat meninggalkan dinas kemiliteran. Konflik antara Nasution khususnya, Angkatan Darat umumnya, dengan Soekarno mulai timbul lagi ketika Soekarno melihat PKI, sebagai empat besar pemenang pemilu pada tahun 1955

¹ David Bouchier, dkk, *Bunga Rampai Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia periode 1965-1999*, Grafiti, 2006, h.125.

perlu mendapat tempat dalam suatu sistem yang dalam konsep Soekarno disebut gotong royong.

Nasution pada pasca pemilu pertama mulai merumuskan teori pelegalan keterlibatan tentara dalam politik. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Internasional dimana pada tahun 1958 di banyak negara seperti Pakistan, Burma dan Thailand terjadi perampasan kekuasaan politik oleh pemimpin tentara². Posisi Nasution di Indonesia amat kuat ketika itu, antara lain karena ia baru saja berhasil mematahkan perlawanan para Panglima Militer Daerah yang memberontak melalui PRRI/ Permesta. Dengan kedudukannya sebagai pemimpin tentara dalam keadaan darurat perang, ia dengan mudah bisa berbuat apa saja terhadap PKI yang sejak tahun 1948 telah menjadi musuh Angkatan Darat. Tetapi justru pada bulan November 1958 itulah Nasution tampil dengan doktrin ‘jalan tengah’ yang disampaikannya lewat sebuah pidato tanpa teks di Akademi Militer Magelang.

Doktrin ‘jalan tengah’ menempatkan militer Indonesia bukan sebagai kekuatan bersenjata yang tidak berpolitik sebagaimana yang menjadi tradisi militer di Barat, tapi juga sebagai tentara yang ingin merebut kekuasaan dan menjadikan penguasa militer seperti yang banyak terjadi di Amerika Latin pada masa itu.

Namun menjelang dekrit presiden 5 Juli 1959 Nasution menjadi sosok yang cukup dekat dengan Soekarno, bahkan cenderung menjadi sekutunya dengan mendorong diberlakukannya kembali UUD 1945. Konstitusi pada masa revolusi itu tentu menguntungkan posisi keduanya. Dengan UUD 1945 Soekarno menjadi

² M.Alfan Alfian M, *Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009, Hal.232

presiden dengan kekuasaan yang amat besar, tidak seperti pada masa parlementer dimana konstitusinya mengharuskan pembagian antara kepemimpinan negara dengan pemerintahan. Kondisi parlemen yang selalu carut marut oleh kepentingan partai dan ideologi, serta pergantian kabinet yang terjadi terus menerus mengakibatkan kondisi politik semakin memburuk.

Sedangkan bagi Nasution, konstitusi 1945 tentu memberi keuntungannya tersendiri karena ia memperoleh keabsahan tentara untuk terlibat dalam politik. Tentara dalam pandangan seorang Nasution adalah suatu kekuatan politik di antara sejumlah kekuatan politik yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Dengan berpandangan seperti ini, maka kita pun akan mampu memahami pengalaman TNI di bawah Soedirman di masa revolusi³.

Pada era akhir Orde Baru, guna mengurangi kesan anti-Islam maka Soeharto memilih panglima ABRI yang berlatar belakang keluarga muslim yang cukup taat, yakni Feisal Tanjung. Selain berlatar belakang keluarganya yang Muhammadiyah, pemilihan sosok Feisal sendiri dikarenakan beliau adalah sosok yang netral yang tidak terlibat dalam gerakan-gerakan keislaman pada saat itu. Hal ini serupa dengan pemilihan sosok Habibie menjadi wakil presiden ketika itu, karena dianggap dari kalangan profesional guna mengurangi resiko kemungkinan tarik menarik kepentingan politik yang dibawanya. Dengan kata lain, pada periode ini Soeharto cenderung memilih orang-orang yang tidak berpotensi melawan kebijakan politiknya, alias orang-orang yang aman karena kenetralan latar belakangnya.

³ Salim Said, *Militer Indonesia dan Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Hal. 178

Rekam jejak kemiliteran seorang Feisal Tanjung dapat dikatakan amat baik, diantara keberhasilannya yakni dalam suksesi Irian Barat pada tahun 1963 dan 1969, operasi Dwikora pada 1965, operasi Seroja di Timor Timur pada 1976, dan sebagai pemimpin DKP (Dewan Kehormatan Perwira) ABRI yang akhirnya memutuskan untuk mencopot Mayor Jenderal Sintong Panjaitan dari jabatan Pangdam Udayana, memberhentikan Brigjen Rudolf Warouw dari Panglima Komando Pelaksana Operasi Timor Timur serta Kapten Choki Aritonang dan beberapa bawahannya sebagai perwira pelaksana di lapangan hingga kemudian membuatnya diangkat sebagai panglima ABRI pada tahun 1993.

Dipilihnya Feisal Tanjung sebagai panglima ABRI pada tahun 1993 sebenarnya cukup mengejutkan karena sebelumnya Feisal bukanlah Kepala Staff AD (KSAD). Biasanya yang dipilih menjadi pangab adalah KSAD, kecuali pada kasus Feisal dan Moerdani. Hal ini dapat dipahami secara politis, karena ketika itu Soeharto tengah memperbaharui hubungannya dengan umat islam⁴, sedangkan calon kuat yang ketika itu menjabat sebagai KSAD yakni Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar dianggap kurang bisa mengurangi citra negatif militer Orde Baru di mata umat Islam, dan di sisi lain sosok Wismoyo sendiri cenderung dekat dengan Moerdani yang dikenal sebagai panglima yang seringkali berkonfrontasi dengan umat Islam pada masa kepemimpinannya.

Feisal Tanjung lahir dengan nama lengkap Feisal Edno Tanjung di Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada 17 Juni 1939 dan merupakan putra ke-5 dari Amin Husin Abdul Mun'im dan Siti Rawani Hutagalung yang

⁴ Muhammad Hisyam, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003, h.348.

merupakan keluarga yang berfaham Muhammadiyah. Feisal adalah alumni dari Akademi Militer Nasional angkatan 1961. Seorang perwira tempur yang banyak menghabiskan kariernya di pasukan khusus; grup Sandi Yudha RPKAD (sekarang Kopassus) dan kemudian Brigade 17 Kostrad⁵. Feisal meninggal pada 18 februari 2013 karena sakit.

Lahir di tengah keluarga Muhammadiyah membuat Feisal lekat dengan pendidikan nilai-nilai Islam sejak ia kecil. Ayahnya, Amin Husin Abdul Mun'in adalah salah satu tokoh pendiri Muhammadiyah di Sibolga, Sumatera Utara yang juga pernah menjabat sebagai Konsul kedua Muhammadiyah Tapanuli yang meliputi wilayah tapanuli Utara, Tapanuli Selatan dan Nias pada tahun 1937-1947⁶. Ayahnya juga merupakan rekan seangkatan HAMKA yang memimpin Muhammadiyah Keresidenan Sumatera Timur yang berkedudukan di Medan⁷, sehingga keduanya sering mengadakan kontak.

Latar Belakang keluarganya inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Feisal kelak mudah diterima di kalangan umat Islam ketika menjadi panglima ABRI. Feisal juga sering mengisi ceramah-ceramah keagamaan di masjid baik ketika peresmian sebuah masjid atau ketika menjadi khotib Jum'at. Ceramah-ceramah itu secara tidak langsung mencoba menghapus paradigma berpikir masyarakat umum bahwa Orde Baru – terutama militernya – adalah rezim yang tidak akrab dengan kalangan Islam⁸.

⁵ Usamah Hisyam (Ketua Tim Penyusun), *Feisal Tanjung: Terbaik untuk rakyat, terbaik bagi Abri*, Jakarta: Dharmapena, 1999, h.748.

⁶ Usamah Hisyam, *Ibid*, Hal.27.

⁷ Keresidenana Sumatera Timur kini menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara dengan Medan sebagai Ibukota Provinsi.

⁸ Feisal Tanjung, *ABRI-Islam Mitra Sejati*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997, h.v

Menjadi Panglima ABRI di tengah suhu politik yang tengah dinamis, terutama antara kalangan Islam, tentara dan pemerintah bukanlah hal mudah. Akar permasalahan hubungan pemerintah dengan Islam yang kurang harmonis bermula sejak peristiwa penolakan pemerintah terhadap rencana rehabilitasi Masyumi pada 1968 yang dikhawatirkan akan membangkitkan kembali kekuatan Masyumi sebagai parpol Islam dalam kancah perpolitikan Indonesia, disusul dengan intervensi pemerintah dalam kepengurusan Parmusi dimana kepemimpinan dari tingkat pusat hingga daerah disterilkan dari tokoh-tokoh yang pernah aktif di Masyumi karena dikhawatirkan akan mengambil posisi berhadapan dengan pemerintah lagi sebagaimana pemberontakan PRRI⁹.

Pada tahun 1973 pemerintah membuat kebijakan fusi partai menjadi tiga, yakni PDI yang berhaluan nasionalis, PPP yang menjadi wadah partai Islam dan Golkar yang menjadi partainya pemerintah Orde Baru. Hal ini dilakukan sebagai salah satu evaluasi terhadap suhu politik akhir tahun 60-an dimana akhirnya pemerintah menunda pemilu 1968 karena kondisi saat itu dinilai kurang menguntungkan Golkar. Puncak hubungan Pemerintah-Tentara-Islam adalah penetapan asas tunggal pancasila sebagai konsekuensi dari P-4 yang kemudian melahirkan peristiwa Tanjung Priok pada 1984. Tentara sebagai salah satu agen yang seharusnya menjadi peredam gejolak di masyarakat ketika itu justru menambah panas suasana, apalagi kepemimpinan tentara pada waktu itu memang berada di kalangan yang cukup bersinggungan dengan kalangan Islam.

Keadaan tersebut sangat berbahaya dalam menjaga kestabilan sebuah negara yang pastinya berpengaruh pada pembangunan Nasional. Pemerintah

⁹ Laode Ida, *Anatomi Konflik NU, Islam dan Negara*, Jakarta : Sinar Harapan, 1996. H.36.

mulai mengambil beberapa langkah guna memperbaiki hubungan dengan kalangan Islam agar bisa menciptakan sinergisitas antara tentara, pemerintah dan kalangan Islam. Puncaknya dalam pembentukan ICMI pada akhir 1990, dan dalam kemiliteran pemerintah kemudian mengganti pemimpin ABRI dengan tokoh yang berlatar belakang Muhammadiyah, yakni Feisal Tanjung. Hal ini tentu menjadi penting karena tentara merupakan salah satu perpanjangan tangan pemerintah ke rakyat dengan prinsip dwifungsinya, maka mengubah citra pemerintah berarti harus mengubah pula wajah ABRI.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik untuk meneliti upaya rekonsiliasi hubungan tentara dengan golongan Islam yang dilakukan oleh Feisal Tanjung dalam kapasitasnya sebagai seorang Panglima ABRI. Sejauh ini ada beberapa karya tulis yang membahas tentang Feisal Tanjung antara lain biografi yang ditulis oleh Solemanto dkk. "*Feisal Tanjung: Terbaik untuk rakyat, terbaik bagi ABRI*" yang diterbitkan oleh yayasan Dharmapena pada tahun 1999 dan kumpulan ceramah keagamaan Feisal Tanjung yang berjudul "*ABRI-Islam Mitra Sejati*" yang diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan tahun 1997. Adapun karya pertama merupakan biografi umum Feisal Tanjung yang mengupas tentang kehidupan Feisal secara umum sejak kecil hingga masa keemasan kariernya sebagai pangab, dari aspek religi, sosial, militer, dan lainnya. Karya kedua merupakan ceramah-ceramah Feisal Tanjung yang dilakukannya selama menjabat sebagai Panglima ABRI yakni pada 1993-1998.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan di Indonesia tahun 1993-1998. Batasan awal dari penelitian adalah tahun 1993, yang merupakan awal Feisal Tanjung diamanahkan sebagai Panglima ABRI. Sedangkan sebagai batas akhir dari penelitian ini adalah tahun 1998, yang merupakan akhir karier militer Feisal sebagai Panglima ABRI.

2. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa Feisal Tanjung tertarik pada dunia Militer?
- b. Mengapa muncul istilah ABRI Hijau dan ABRI Merah Putih ketika Feisal Menjadi Panglima ABRI?
- c. Bagaimana upaya-upaya Feisal Tanjung dalam mempererat hubungan ABRI dengan golongan Islam pada tahun 1993-1998?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan upaya-upaya Feisal Tanjung dalam mempererat hubungan ABRI dengan golongan Islam pada tahun 1993-1998.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan tema-tema penulisan sejarah khususnya penulisan biografi tematik ataupun memoar tokoh dan juga dapat menjadi salah satu sumber tentang kajian sejarah kemiliteran Orde Baru.

Selain itu juga diharapkan berguna sebagai sumber bacaan dalam kajian-kajian politik militer pada sejarah perjuangannya di Indonesia terutama pada masa Orde Baru, sehingga para pengkajinya mendapat suatu manfaat positif dari tulisan ini dan lebih semangat untuk mengembangkannya kembali.

D. Metode dan Sumber Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dan penyajian hasil penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif-naratif yang lebih banyak menguraikan kejadian dalam dimensi ruang dan waktu.

Sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian sejarah, metode sejarah mempunyai lima tahapan yaitu pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, kritik, interpretasi, dan penulisan atau historiografi¹⁰. Penelitian ini menempuh beberapa langkah/tahapan sebagai berikut:

Pada tahap pemilihan topik, penulis tertarik memilih sosok Feisal Tanjung karena saat itu tengah banyak pemberitaan tentang wafatnya sang Panglima ABRI tersebut. Sebagaimana diketahui penulis, Feisal adalah sosok panglima di akhir periode Orde Baru yang menjabat di tengah dinamika politik yang dinamis. Hal

¹⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Benteng, 2001, h. 91

ini menjadi menarik bagi penulis untuk lebih menggalinya dan memilihnya menjadi topik penelitian skripsi.

Pada tahap heuristik dalam rangka menjajaki dan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan Feisal Tanjung, penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan studi kearsipan untuk memperoleh buku-buku, majalah, artikel, dan arsip yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Sumber-sumber tersebut banyak terdapat di Perpumda DKI Jakarta, perpustakaan ANRI, dan Perpustakaan nasional. Penulis tidak berhasil melakukan wawancara dengan tokoh Islam dan tokoh militer pada masa ketika Feisal Tanjung menjadi Panglima ABRI.

Dalam tahap kritik dilakukan pengujian terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber yang ada. Peneliti melakukan analisa data melalui metode sejarah dengan melakukan seleksi terhadap data yang ada. Ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Kritik juga dilakukan secara eksternal terkait latar belakang politik sang penulis sumber.

Pada tahap interpretasi, fakta-fakta yang telah didapat peneliti dikelompokkan sesuai dengan klasifikasinya, dan selanjutnya dianalisa dan sintesa berdasarkan pemahaman dan logika peneliti.

Terakhir, pada tahap penulisan, peneliti mengungkapkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, dan jelas sesuai dengan kaidah keilmiah yang berlaku.

2. Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan sumber-sumber primer dan sekunder. Adapun sumber primernya adalah kumpulan ceramah-ceramah Feisal. Ceramah ini telah dibukukan dan berisi ceramah Feisal di masjid-masjid dalam banyak kesempatan ketika melakukan peresmian masjid-masjid tertentu ataupun sebagai penceramah dalam pengajian.

Adapun sumber sekundernya adalah telaah buku-buku yang menulis tentang Feisal dalam biografi rekan kariernya seperti Mayjen Sintong, Wiranto, Prabowo, Soemitro dan lainnya, serta artikel, jurnal, surat kabar dan arsip yang membahas tentang beliau. Selain bahasan tentang beliau juga tentunya yang membahas tentang kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya pada hal-hal terkait dalam tulisan ini, sebagai sumber yang memperkaya pengetahuan dan pemahaman penulis tentang sesuatu yang telah diteliti.

BAB II

LATAR BELAKANG KEHIDUPAN FEISAL TANJUNG

A. Sosial-Budaya

Feisal berasal dari keluarga Muhammadiyah¹¹ Tapanuli, yakni pasangan Amin Husin Abdul Mun'in Tanjung dengan Siti Rawani Hutagalung. Feisal merupakan anak kelima dari sepuluh bersaudara, ia merupakan satu-satunya anak dalam keluarganya yang lahir di Tarutung, sedangkan yang lain lahir di Sibolga.

Feisal lahir di Tarutung, ketika keluarganya belum lama pindah dari Sibolga ke kota itu karena amanah dakwah. Tarutung amat berbeda dari Sibolga pada tahun 1930-an. Sebagian masyarakat Tarutung beragama Kristen. Bahkan Tarutung merupakan salah satu pusat pengembangan pendidikan agama Kristen yang dibina oleh misi zending pemerintahan Belanda yang bernama Pendeta Nommensen. Tarutung dijadikan oleh pemerintah kolonial sebagai salah satu pusat pemerintahan sipil dan militer¹².

Ayahnya, Mun'in, dikenal oleh penduduk Sibolga sebagai tokoh, ulama, birokrat, dan pimpinan Muhammadiyah yang amat disegani. Ayahnya merupakan pejuang Islam di Tapanuli sejak pra-kemerdekaan yang menentang pemerintah kolonialisme. Mun'in belajar mengaji pada ayahnya sendiri sejak kecil dengan sistem sorogan, sebuah sistem pengajaran agama Islam yang masih berlaku

¹¹ Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, Hal 75 menulis, Muhammadiyah adalah organisasi gerakan Islam yang didirikan K.H Ahmad Dahlan di Yogyakarta tahun 1912. Muhammadiyah diambil dari nama Nabi Muhammad SAW dengan mendapat tambahan “yak-nisbah” sehingga menjadi Muhammadiyah. Maksudnya, secara perseorangan, siapa saja yang menjadi warga dan anggota Muhammadiyah dapat menyesuaikan diri dengan pribadi Nabi Muhammad SAW.

¹² R.Kurris, *Pelangi di Bukit Barisan: Gereja katolik Memasuki Tapanuli*. Kanisius, 2006. Hal.19

hingga kini di pesantren-pesantren. Mun'in menempuh pendidikan agama di Islamiyah School, Barus, pada tahun 1926. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Mambaul-Ulum (Madrasah Ulumul Arabiyah) di Tanjung Balai, Asahan. Kala itu, Tanjung Balai menjadi kota rujukan dalam menuntut pelajaran agama. Sekolah agama disini dikenal sebagai sekolah yang terbaik di Sumatera Utara. Kabupaten Asahan sendiri merupakan daerah yang penduduknya banyak memeluk agama Islam dan taat melaksanakan ajaran agama. Keluarganya sejak dulu memang keturunan keluarga muslim yang sangat agamis di daerahnya.

Ibunya, Rawani, pada masa mudanya dikenal sebagai tokoh pergerakan yang pandai berorasi di depan massa di Sibolga. Rawani mengali ilmu hingga tamat di Christelyke HIS, sekolah yang khusus didirikan Belanda untuk keluarga terpandang di Sibolga. Karena itu, budaya barat yang positif sudah sejak awal menyentuh kehidupan Rawani, seperti berfikir kritis dan berdisiplin tinggi. Perpaduan kedua latar belakang yang berbeda ini tentu saling melengkapi dalam rumah tangganya, sehingga keadaan keluarga yang dibinanya bernuansa agamis dan berdisiplin tinggi. Selalu ada forum “pengajian” bersama di rumahnya setelah shalat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan makan malam bersama¹³.

Setelah menikah dan memiliki anak, Rahwani justru malah terlibat aktif dalam kegiatan dakwah suaminya. Rahwani masuk dalam organisasi Aisyiah di Sibolga dan menjadi salah satu mubalighohnya¹⁴ sejak Mun'in diamanahkan sebagai Konsul kedua dalam struktur Muhammadiyah Tapanuli pada tahun 1937.

¹³ Usamah Hisyam (Ketua Tim Penyusun), *Feisal Tanjung: Terbaik untuk rakyat, terbaik bagi Abri*, Jakarta: Dharmapena, 1999, h. 27- 34.

¹⁴ Mubalighoh secara bahasa bermakna penyeru, penyampai. Yakni juru dakwah wanita yang menyampakan nilai Islam.

Menarik untuk disimak adalah tentang marga yang disandang oleh Feisal, yakni Tanjung. Ayahnya, Mun'in, berasal dari marga Pasaribu, penduduk asli Sibolga yang datang dari rumpun Batak Toba. Namun ketika Mun'in tumbuh dewasa, serta telah menyelesaikan pendidikan di Asahan dan kemudian turut menyiarkan agama Islam di Tapanuli maupun Nias ia lebih suka untuk tidak mencantumkan marga di belakang namanya. Usamah Hisyam dalam biografi Feisal Tanjung menganggap bahwa tidak dicantumkannya marga tersebut karena pada masa itu sebagian besar pulau Nias masih menganut aliran Animisme dan sebagian lagi beragama Kristen Protestan¹⁵. Namun ia tidak menolak jika disebut sebagai orang Batak. Pilihan sikap seperti itu tentu tidak terlepas dari latar belakang pengalaman dan pergaulannya dalam masyarakat ketika itu¹⁶.

Menurut Radja Djafar Hutagalung, mayoritas masyarakat yang memeluk Islam memang enggan menggunakan marganya, karena pada masa sebelum kemerdekaan orang yang bermarga identik dengan pengikut kepercayaan animisme dan identik dengan agama non-muslim. Baru pada setelah masa reformasi dimana banyak keturunan Batak yang memeluk Islam, marga tidak selalu identik dengan agama Kristen¹⁷.

¹⁵ Usamah Hisyam, *Ibid*, Hal 39

¹⁶ Dalam buku “terbaik untuk Rakyat, terbaik untuk ABRI”, keterangan itu ditulis pada catatan kaki. Tentang kebudayaan masyarakat Nias lebih lanjut di <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38084/4/Chapter%20II.pdf>

¹⁷ R. Kurris, *Ibid*, Hal. 56.



18

Mun'in tidak memberi marga di belakang nama anak-anaknya. Baru setelah kakak sulung Feisal, yakni Fahmi kuliah di Fakultas Kedokteran USU, masalah marga menjadi perhatian karena di sana banyak yang memakai marga. Ketika itu Mun'in hanya berkata “pakai saja marga Tanjung”. Sejak itulah di belakang nama putra putrinya dicantumkan marga Tanjung.

Pada masa itu orang yang menggunakan marga selalu identik dengan orang Kristen. Oleh karenanya wajar saja bila banyak muslim atau pemeluk agama lain yang berasal dari suku Batak akhirnya menanggalkan atau enggan menggunakan marganya. Namun hal tersebut tentu berbeda dengan sekarang dimana beberapa marga sudah tidak identik lagi dengan agama Kristen. Saat ini banyak orang bermarga Tanjung, Siregar, dan lainnya tapi Islam. Karena setiap orang bisa berubah keyakinan, dan marga berkaitan dengan keturunan.

Marga Tanjung berasal dari tiga hal. Pertama Sumatera Utara, tepatnya Tapanuli Utara sesuai garis keturunan Batak. Kedua dari Sumatera Barat, sekalipun ternyata banyak yang mulanya berasal dari Tapanuli Utara yang hijrah ke sana untuk memperdalam ajaran Islam.. dan ketiga adalah para pendatang yang tidak memiliki marga, kemudian diberi marga kehormatan Tanjung yang pada umumnya diberikan pada pendatang yang beragama Islam.

Adapun pilihan marga Tanjung mungkin karena keluarga ayah Feisal tinggal di Tapanuli Utara. Tentu hal ini tidak terlepas dari marga itu sendiri yang identik dengan identitas Batak Islam dibandingkan dengan marga Pasaribu yang masih identik dengan nasrani.

Namun sebenarnya pada masa sekarang marga tidak selalu identik dengan agamanya. Marga sendiri merupakan ikatan turun temurun yang akan didapat tiap individu berdasarkan keturunannya dan tidak bisa diubah sampai kapan pun, sedangkan keyakinan merupakan hak dan pilihan tiap individu terlepas dari manapun ia dilahirkan yang bisa saja ia pindah dari keyakinan satu kekeyakinan yang lain.

Keluarga Feisal Tanjung memiliki kekhasan tersendiri dalam namanya. Mun'in memberi nama kesepuluh putra-putrinya dengan berawalan huruf 'F' sedangkan di tengahnya adalah urutan kelahiran disesuaikan dengan urutan abjad A, B, C, D, dan seterusnya. Nama kesepuluh anaknya yaitu:

Anak ke-	Nama
1	Fahmi A. Tanjung, lulusan Fakultas Kedokteran USU.
2	Fuad B. Tanjung
3	Farida C. Tanjung
4	Fauziyah D. Tanjung, meninggal ketika masih balita
5	Feisal Edno Tanjung
6	Farouk Freddy Tanjung, sempat menyandang pangkat brigjen TNI Marinir sebagai Kepala Staf Korps Marinir TNI AL
7	Fakziah G. Tanjung, meninggal ketika masih balita.
8	Fummy H. Tanjung
9	Farhan I. Tanjung
10	Ferry J. Tanjung

Pada usia Feisal setahun Mun'in dan keluarga pindah dari Tarutung ke Kota Baringin, Sibolga, kota pantai di pesisir barat Sumatera Utara yang berhadapan dengan teluk Tapan Nauli dan Pulau Musala. Jaraknya sekitar 400 kilometer arah barat daya kota Medan, ibukota provinsi Sumatera Utara. Di kota Baringin inilah ia menghabiskan masa anak-anaknya, dan di kota inilah ia mulai

berkenalan dengan dunia militer yang kelak akan memupuk rasa cintanya untuk mengabdikan sebagai prajurit bagi negaranya dengan memilih menjadi bagian dari dunia militer itu sendiri.

Setiap pagi setelah shalat shubuh, ayah Feisal membiasakan anak-anaknya untuk sekadar berjalan-jalan di tepi pantai, berdialog dan bersantai. Jarak antara rumah dengan pantai cukup dekat. Sambil menikmati kue dan jajanan yang dibeli biasanya Mun'in menasihati anak-anaknya dengan bercerita santai yang mengandung nilai-nilai Islami.

Pada saat pemerintahan Jepang, sebagian besar impor keperluan perang Tapanuli dilakukan lewat teluk Sibolga. Daerah Sibolga dan sekitarnya (Sumatera) berada di bawah kendali Tentara AD ke-25 yang berkedudukan di Bukittinggi. Bagi Jepang, Sibolga memiliki nilai strategis di bidang sosial ekonomi dan militer, karena posisi geografisnya menghadap ke Teluk Sibolga yang langsung menuju ke Samudera Hindia. Jepang kemudian membangun sejumlah benteng pertahanan dan bunker untuk mengantisipasi kemungkinan serangan Sekutu dari Australia dan Asia Selatan. AL Jepang pun mengadakan perekrutan rakyat pribumi, hingga akhir PD II banyak warga Sibolga yang bergabung dalam lembaga perekrutan Jepang.

Bagi anak-anak Sibolga yang hidup tidak jauh dari daerah pantai pada pasca kemerdekaan, melihat tentara adalah hal yang amat biasa karena daerah ini memang sering dilewati tentara ALRI dan di daerah ini pula pernah terjadi

pertempuran mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1947¹⁹ antara tentara RI melawan pasukan gabungan NICA-sekutu.

Menjelang kenaikan kelas VI, ketika Feisal berumur 11 tahun mereka sekeluarga pindah ke Medan karena tuntutan pekerjaan sang ayah. Mereka menempati daerah yang dikenal sebagai tempat mangkal para jagoan muda, yakni gang Manggis, Ujung Kampung, Jalan Serdang. Disinilah Feisal mulai mengenal pergaulan yang kurang agamis. Berbeda dengan Sibolga yang homogen dengan pergaulan di sekitar pantai, Medan mengenalkan Feisal remaja pada gaya hidup urban dan kawan-kawan yang heterogen. Teman-temannya berasal dari berbagai etnis, dan ia dikenal sebagai pemberani sehingga mendapat julukan dari teman-temannya ‘jagoan dari gang Manggis, Ujung Kampung’.



Markas ALRI TAPANULI di Sihorbo (Barus) pada Masa Perang Kemerdekaan

20

Masa remaja Feisal termasuk anak yang nakal. Bahkan ia merokok sebagaimana dituturkan oleh adiknya:

¹⁹ Sugeng Rahayu, ‘Pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh ALRI Pangkalan Sibolga/Tapanuli’ dalam Majalah Legiun Veteran RI Vol.2 N0.7 Maret 2012, Hal.39-42. Atau dapat dibaca juga dalam M.Daud Silalahi, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945-1950*, Badan Pemurnian Sejarah Indonesi-Minangkabau. 1991. Hal.504

²⁰ Sugeng Rahayu. Ibid. Hal. 41. Jika kita perhtikan maka markas tentara ketika itu masih sederhana, dan bias disimpulkan juga tempat tinggal Feisal pun memang cukup sederhana disbanding penduduk sekitar.

“Sejak masa remaja, abang Feisal sudah memiliki spirit yang tinggi untuk maju... ia juga konsisten dan konsekuen dengan apa yang menjadi pilihan hidupnya. contoh yang ringan adalah berkenaan dengan kebiasaan buruknya merokok. Dahulu ia seorang perokok berat. Namun, kalau ia sudah memutuskan untuk berhenti, maka merokoknya. Jadi, kalau orang lain merasa tidak bisa, Feisal justru menjadi tertantang dan berprinsip harus bisa”²¹.

Pernah sekolah di SR Yosua dan SMP Roma Katolik sempat mengkhawatirkan sang Ayah karena perlahan mengikis sikapnya, ditambah dengan pergaulan anak-anak seusianya. Pada masa-masa SMP ini Feisal dapat dikategorikan sebagai anak nakal. Kekhawatiran ini membuat ayahnya akhirnya memindahkan Feisal ke SMP Muhammadiyah Medan ketika ia akan naik ke kelas tiga.

Namun alasan pindah sekolah itu bisa jadi bukan hanya karena faktor kekawatiran orang tua terhadap aqidah seorang Feisal. Sebagaimana kita ketahui berdasarkan penuturan adik Feisal, sosok Feisal yang memang menjadi perokok berat di usia SMP dan dikenal sebagai anak nakal. Pada masa itu kedua hal tersebut tentu bukanlah hal yang masih wajar ataupun biasa di kalangan remaja. Kedua hal tersebut bisa jadi menjadi salah satu faktor lain yang membuatnya berpindah sekolah dari sekolah Katolik ke sekolah berbasis agama Islam karena sekolah Katolik cenderung disiplin terhadap siswanya.

B. Ekonomi

Feisal lahir dan besar dalam asuhan keluarga yang sederhana secara ekonomi. Walaupun ibunya anak orang yang cukup kaya, tapi dalam keadaan

²¹ Usamah Hisyam, *Terbaik untuk Rakyat Terbaik bagi ABRI*.hal.66

ekonomi keluarganya ia tidak pernah menggantungkan diri pada ayahnya, ia sepenuhnya mengikuti suaminya.

Awal pernikahan antara Mun'in dengan Rawani memang dimulai dengan membangun rumah tangga yang sederhana. Ibunya, Siti Rawani Hutagalung merupakan anak seorang pedagang karet yang kaya dan kerap menjual hasil panennya sampai ke Singapura. Namun demikian setelah berumah tangga Rawani mengikuti pola keluarga suaminya yang memang sederhana, tidak lagi bergantung dan meminta tolong secara materil pada keluarga ayahnya. Untuk membantu nafkah keluarganya Rawani juga mengelola toko buku Ahda milik suaminya.

Namun perlahan dengan usaha yang maksimal dan setelah memiliki tiga anak keadaan ekonominya lumayan membaik. Ayahnya ketika Feisal dilahirkan, Amin Husin Abdul Mun'in, menjabat sebagai konsul kedua Muhammadiyah di Tapanuli pada periode 1937-1947. Ia pindah ke Tarutung ketika Rawani mengandung Feisal karena adanya penugasan pelebaran dakwah di sana dari organisasi Muhammadiyah.

Mereka tinggal di rumah berukuran 7x21 meter, *“sangat kecil untuk ukuran saat itu, apalagi bagi sebuah keluarga yang memiliki anak cukup banyak,”* tutur Farhan²², adik Feisal. Sebagaimana kita ketahui bahwa pasca kemerdekaan kondisi ekonomi Indonesia cukup buruk, apalagi ketika masa revolusi. Begitu pula keadaan ekonomi di Sumatera, banyak usaha yang tutup.

Pada tahun 1950-an ketika Feisal masuk ke SMA, orang-orang Medan yang melanjutkan sekolah hingga jenjang SMA tidaklah banyak. Selain karena ketidakmampuan orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya sampai tingkat

²² Usamah hisyam, Hal.46.

SMA, juga karena jumlah SLTA masih amat terbatas. Sebagai gambaran, pada awal 1950-an hanya tercatat tiga SMA Negeri di seluruh Sumatera Utara, yakni SMA Negeri Medan, SMA Negeri Balige, dan SMA Negeri Padang Sidempuan. Kalau ditambah dengan SMA swasta jumlah sekolah menengah itu pun masih amat sedikit, bahkan masih terhitung jari²³.

Dalam hal prestasi, Feisal mengaku termasuk yang baik, “*sejak SD hingga SMA saya selalu masuk ranking baik*”. Namun selama menjadi siswa SMA ia bukanlah termasuk anak yang menonjol dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ia tidak pernah terpilih menjadi ketua kelas, apalagi menjabat sebagai pengurus semacam OSIS. Citra sebagai pelajar amat jauh dengan citra dirinya dalam pergaulan. Di luar sekolah ia kenyang dengan pengalaman sebagai remaja jagoan yang didaulat menjadi pemimpin oleh kelompoknya sedangkan di sekolah ia menjadi seperti anak-anak lain pada umumnya.

C. Pendidikan

Feisal sempat mendapat pendidikan dasar di SR (Sekolah Rakyat) Sibolga hingga kelas lima, lalu pindah ke Sekolah Rakyat Yosua yang terletak di Medan bersamaan dengan perpindahan keluarganya ke Medan karena ayahnya bekerja di Medan sebagai Pegawai Negeri di jawatan Penerangan.

Pada usia sembilan tahun, ketika ia masih berada di Sibolga, terjadi Agresi Militer Belanda I dimana kota Sibolga, terutama di sekitar teluk Tapin Nauli menjadi salah satu tempat yang dijaga ketat oleh Belanda. Masa-masa inilah

²³ T.B.Silalahi, *Anak Hadal TB Silalahi: Sebuah Biografi*, Yayasan Sopoturung, Jakarta, 1996. Hal 96.

masa-masa yang sulit untuk anak seusianya, dimana pendidikan dasarnya tidak bisa berjalan dengan rutin karena adanya perang tersebut. Feisal sekolah di pagi hari, dan belajar mengaji di siang harinya di Perguruan Islamiyah. Ayahnya mengajarkan pendidikan agama formal juga ke anak-anaknya agar sejak kecil lebih dekat dengan Islam.

Keadaan semakin sulit saat agresi militer kedua Belanda pada 1948, di mana kota Tapanuli berhasil diduduki oleh Belanda. Setahun sebelumnya daerah di sekitar Tapanuli telah lebih dahulu dikuasai Belanda. Akibatnya terjadi pengungsian besar-besaran, dan keluarga Feisal pun turun ikut mengungsi ke Kampung Sibolga Julu, kemudian sempat ke Sibulan dan akhirnya ke Sorkam.

Lulus pendidikan dasar pada tahun 1952, Feisal melanjutkan ke SMP Roma Katolik. Namun karena kekhawatiran sang Ayah akan kondisi akidah putranya yang bersekolah di lingkungan pastor itu, akhirnya pada saat naik ke kelas tiga SMP, Feisal dipindahkan ke SMP Muhammadiyah Medan dan berhasil merampungkan pendidikannya pada 1955.

Ia melanjutkan ke SMA Taman Siswa Medan, namun karena jauhnya jarak sekolah dari rumahnya ia pun pindah ke SMA Prayatna di Jalan Serdang. Pada kala itu, SMA Prayatna merupakan sekolah swasta terbaik di sana. Seluruh gurunya berasal dari guru SMAN 1 Medan, sehingga mutu SMA Prayatna sama dengan SMAN 1 Medan. Namun sekarang sekolah itu tinggal kenangan karena sekarang sudah dibangun menjadi sebuah Perguruan Tinggi Swasta.

Untuk anak seusianya pada masa itu, Feisal termasuk anak yang rajin membaca. Ia tertarik dengan buku-buku sejarah dan kisah perang, detektif, serta cerita para tokoh-tokoh besar. Walau ia tergolong anak nakal namun kebiasaan

ayahnya yang selalu membawa surat kabar dan majalah terbitan Medan maupun Jakarta setiap pulang kerja membuatnya terfasilitasi untuk mengembangkan wawasannya seputar perkembangan yang terjadi di Sumatera bahkan Indonesia, baik di bidang politik, maupun perjuangan para pahlawan bangsa pada saat itu. Itulah mengapa ia bisa berbicara banyak tentang tokoh-tokoh dunia yang sedang meroket saat itu. Wawasannya terlihat lebih menonjol daripada teman-teman sebayanya.

D. Proses Menjadi Taruna

Feisal merasa ingin menjadi tentara sejak masa kanak-kanak di Sibolga, sebagaimana keinginan anak-anak Sibolga pada umumnya yang dalam kesehariannya sangat akrab dengan pantai, ombak, dan sering bertemu dengan prajurit Angkatan Laut. Awalnya ia berminat menjadi tentara AL. Keinginan itu pun tumbuh seiring dengan seringnya ia membaca tentang tokoh pelaku perjuangan serta kisah pertempuran yang heroik. Apalagi kondisi perang pasca kemerdekaan yang dialaminya waktu kecil, membuat Feisal remaja tertarik pada dunia kemiliteran, terutama Angkatan Laut.

Ketika duduk di kelas tiga SMP Feisal diam-diam pernah mendaftarkan diri menjadi aspiran kadet Akademi Angkatan laut (AAL) tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ketika itu Akademi Angkatan Laut menerima tamatan SMP untuk menjadi aspiran kadet dan tamatan SMA menjadi kadet. Menurut perhitungan Feisal, jika diterima menjadi aspiran kadet, maka dua tahun kemudian dapat menjadi kadet, sehingga memperoleh keuntungan waktu satu tahun lebih cepat. Sebab jika ia ingin menjadi kadet, ia harus menunggu tiga tahun lagi setelah tamat

SMA. Namun akhirnya Feisal ditolak karena tidak memenuhi syarat usia minimal yang ditetapkan yaitu 16 tahun, ketika itu ia baru berusia 15 tahun.

Selepas tamat SMA, ia mendaftar ke AAL dan juga mengisi formulir pendaftaran masuk AMN tanpa sepengetahuan ayahnya. Ayahnya tidak setuju dengna cita-cita Feisal menjadi tentara karena ayahnya ingin Feisal menjadi seperti kakak sulungnya, Fahmi, kuliah di Fakultas Kedokteran. Amatlah wajar karena dirasa lebih menjanjikan masa depan dibandingkan dengan profesi militer yang ketika itu pasca restrukturisasi dan rasionalisasi di lingkungan militer yang meresahkan para prajurit. Namun bagi Feisal, masuk ke sekolah ikatan dinas pun di sisi lain dapat meringankan beban orang tuanya yang harus membiayai sekolah anak-anaknya. Maka akhirnya kakak sulung Feisal, Fahmi Tanjung-lah yang berdialog dengan sang ayah untuk kemudian merestui pilihan Feisal.

Feisal boleh menjadi jagoan renang di pantai, laut ataupun sungai. Namun ternyata garis hidupnya bukan di laut. Ia menerima surat panggilan dari AMN lebih dulu daripada surat panggilan dari AAL yang sebenarnya ia harapkan. Ia tak dapat mundur lagi dari AMN karena konsekuensinya harus membayar ganti rugi bila mundur. Feisal termasuk yang cukup beruntung, karena dari banyaknya siswa SMA Prayatna yang mendaftar di AMN, hanya Feisal yang lolos seleksi pertama di tingkat kodam. Ia juga lulus sebagai Calon Prajurit Taruna (capratar) setelah seleksi tahap dua di Garnisun Cimahi. Feisal dan 169 kawannya terdaftar sebagai taruna 1958 yang kemudian tercatat dalam sejarah AMN sebagai perwira lulusan atau angkatan tahun 1961.

Adapun beberapa taruna yang kelak cukup tersohor yang berada dalam satu peleton bersama Feisal antara lain TB Silalahi, ZB Palaguna, Toni Hartono,

ATS Siagian, Azhim Zahif, Ramli Hasan Basri, Rusmani Siddik dan Ali Mursalam. Beberapa taruna diluar peletonnya yang juga seangkatan beliau ialah ZA Maulani, yang sama-sama memilih Korps Infanteri setelah lulus AMN, beliau menggantikan Feisal sebagai Pangdam VI/Tanjung Pura, yang juga pernah menjadi kepala BAKIN.

E. Rekam Jejak Karier Militer Feisal Tanjung

Sebagai seorang perwira, ia dapat dikatakan memiliki alur karir yang sangat cemerlang. Feisal menjajaki jenjang karir dengan cukup pesat. Di bawah ini adalah karir Feisal Tanjung sejak di militer hingga memiliki jabatan di Kabinet Reformasi Pembangunan pada tahun 1999:

Nomor	Tahun	Jabatan
1	1962	Komandan Pleton Yonif 152 Kodam XV/Pattimura
2	1962	Komandan Kompi II Yonif 152 Kodam XV/Pattimura
3	1965	Komandan Kompi Batalyon 3 RPKAD
4	1967	Komandan Datasemen 41 Grup 4 RPKAD
5	1968	Komandan Karsa Yudha I Grup RPKAD
6	1969	Komandan Tim Expedisi Lembah 'X', Irian Jaya
7	1970	Wakil Komandan Grup I RPKAD
8	1972	Dosen Sekolah Staf dan Komando AD

9	1974	Kepala Staf Brigadir infanteri Linud 17 Kujang I Kostrad
10	1977	komandan Brigadir Infanteri linud 17 Kujang I Kostrad
11	1979	Asisten Operasional Kostrad
12	1981	Kepala Staf Komando tempur Linud Kostrad
13	1981	Panglima Komando Tempur Linud Kostrad
14	1983	Komandan Pusat Infanteri
15	1985	Panglima Kodam VI/ Tanjungpura
16	1988	Komandan Sekolah Staf dan Komando AD
17	1992	Kepala Staf Umum ABRI
18	1993	Panglima ABRI
19	1998	Menteri koordinator bidang Politik dan keamanan Kabinet Pembangunan VII
20	1998-1999	Menteri coordinator bidang Politik dan keamanan Kabinet Reformasi Pembangunan

24

Sedangkan untuk riwayat penugasan yang pernah dilaksanakan adalah Operasi Masohi Penumpasan RMS (1963), Operasi Trikora-Perebutan Irian Barat (1963), Operasi Dwikora-Konfrontasi Malaysia (1965), Operasi G 30 S (1965), saat itu beliau masih menjadi komandan kompi dan terlibat dalam menertibkan gerakan 30 S. Operasi Wibawa OPM di Irian 1967, Team ICCS G IV (1973), dan

²⁴ Iwan Santosa, '*Rekaman Karier Feisal Tanjung*', Kompas online, 18 Februari 2013. Diakses pada Senin 25 februari 2013 pukul 12:34 WIB

Operasi Seroja Timor-Timur (1976). Sedangkan Tanda Jasa yang diterima dari Pemerintah RI, antara lain Bintang Mahaputra Adi Pradana, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama. Selain itu, pria asli Taruntung ini juga menerima berbagai Satya Lencana, antara lain Satya Lencana (SL) Santi Dharma X, SL Gerakan Operasi Merdeka (GOM III-RMS), SL Wira Dharma Dwikora, SL Satya Dharma Trikora, SL Penegak G 30 S-PKI, SL GOM IX Raksasa Dharma, SL Kesetiaan VIII, XVI, XXIV dan XXXII tahun, dan SL Seroja serta SL Dwija Sista.

Feisal diresmikan menjadi Panglima ABRI menggantikan Edi Soedrajat pada 21 Mei 1993. Terkait terpilihnya Feisal sebagai panglima ABRI banyak yang mengajukan pendapat bahwa hal tersebut berkaitan erat dengan upaya Soeharto mempererat hubungan dengan kalangan Islamis. Bagi Gusdur yang menganggap pembentukan ICMI sebagai pukulan mendahului oleh Soeharto terhadap para penentangannya dari kalangan militer, pemilihan Feisal pun merupakan strategi yang membuktikan keterpihakannya pada kelompok Islamis, dimana Soeharto berusaha mencari dukungan darinya akibat militer dinilai kurang lagi setia padanya.

BAB III

DINAMIKA HUBUNGAN ABRI DENGAN GOLONGAN ISLAM

A. Tentara Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan

Siapa pun juga yang sekadarnya mengamati perjalanan sejarah Orde Baru akan payah juga untuk menghindari kesimpulan bahwa Orde Baru, sejak semula – sejak kedudukan Soeharto telah aman di puncak kekuasaan – menjalankan politik anti “Islam politik”. Salim Said ketika memaparkan penjelasannya tentang alasan mengapa tentara tidak mengambil kekuasaan saat mundurnya Soeharto pun menjelaskan hal tersebut dan menyimpulkan bahwa kebijakan depolitisasi Islam, menjauhkan Islam dari politik, merupakan salah satu kebijakan dasar yang diterapkan Orde Baru dalam langkah politiknya²⁵.

Untuk dapat memahami kondisi militer dalam periode ini, perlulah kiranya kita juga faham pola umum Orde Baru dan segala kebijakan yang dilaksanakannya. Militer tentu bagian dari negara yang digunakan untuk perpanjangan tangan pemerintah dalam mencapai cita-citanya.

Menurut Eep Saefulloh Fattah, manajemen konflik politik Orde Baru memiliki pola umum yang meliputi beberapa aspek: pola manajemen konflik politik, arah manajemen konflik politik, dan efektifitas manajemen konflik politik yang terurai dalam setidaknya delapan ciri khusus yaitu:

1. Negara Orde Baru melakukan penekanan dan pembatasan luas konflik politik secara represif, setidaknya quasi-represif dimana konflik ditekan dan dibatasi kemungkinan perluasannya melalui berbagai tindakan negara.

²⁵ Salim Said, ‘*Soeharto dan Militer*’ dalam *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, hal.145.

Lebih jauh, konflik dilokalisasi menjadi berskala sempit dan kecil agar negara lebih mudah mengendalikan, memadamkan, dan mengontrol konflik politik dan para partisipannya. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus ketika Orde Baru merasa berkonflik dengan golongan Islam politik dan beberapa gerakan Islam lainnya seperti di kasus Komando Jihad dan Tanjung Priuk.

2. Intensitas konflik politik ditekan dan dibatasi dengan penggunaan manipulasi simbol dan cara-cara quasi-represif, bahkan represif. Komitmen sosial yang meluas karena isu-isu dan substansi konflik ditekan hingga tidak meluas dan tereduksi hingga ke tingkat minimal. Tujuannya tentu agar sosialisasi konflik yang dilakukan oleh para partisipan konflik tidak berkembang secara efektif, sementara privatisasi konflik yang dilakukan oleh negara dapat berkembang secara efektif.

Kasus pengeboman BCA, peledakan Borobudur, dan Tanjung Priuk merupakan beberapa contohnya dimana kasus-kasus tersebut direduksi agar tidak terkesan sebagai konflik antara ideologi formal negara dengan ideologi informal yang dianut oleh masyarakat.

3. Ketampakan konflik dibatasi dan ditekan oleh aparaturnya. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang peristiwa konflik ditutup-tutupi oleh berbagai langkah politik negara. Misalnya: pembatasan pemberitaan media massa, keharusan untuk merujuk sumber resmi dari negara saja, bahkan pemberangusan media massa. Maka wajarlah jika setiap konflik menjadi simpang siur dalam hal kronologi konflik yang lengkap, berapa jumlah

korban persisnya serta isu-isu substansif macam apa yang sebenarnya diangkat oleh sebuah peristiwa konflik politik itu.

4. Penekanan represif terhadap upaya sosialisasi konflik yang disertai pula oleh penggunaan saluran non-institusional untuk tujuan tersebut. Ciri ini merupakan konsekuensi logis dari ciri ketiga.
5. Pengembangan privatisasi konflik dilakukan secara leluasa oleh negara dan kerap dilakukan secara represif serta nonkonstitusional dalam tataran filosofis dan tataran praktis. Dalam tataran filosofis yakni dengan memberikan cap ideologis bahwa konflik politik adalah perilaku abnormal masyarakat serta tidak sejalan dengan “norma-norma Demokrasi Pancasila”.
6. Pemberian sanksi bersifat eksternal yang seringkali dilakukan secara nonlegal dan kadang malah tidak ada sanksi internal.
7. Cenderung mengarah pada terciptanya stabilitas otokratis serta mewujudkan model kekuasaan yang alienatif.
8. Efektifitas manajemen konflik politik lebih bersifat semu dan bukan solutif terhadap substansi konflik. Sebaliknya resolusi konflik kurang terlihat²⁶.

Dengan memahami pola Orde Baru tersebut kita dapat memahami posisi militer dan segala kebijakan yang diterapkan padanya dalam upaya mengatasi segala dinamika kenegaraan yang terjadi, termasuk dalam hal ini adalah dinamika hubungan negara yang nantinya terwakili dengan militer dengan gerakan-gerakan Islam yang terjadi selama Orde Baru.

²⁶ Eep Saefulah Fatah, *Zaman Kesempatan*, Pustaka Mizan, Jakarta, 2000. Disarikan dari hal 54-61

Dalam menjalankan kebijakannya tersebut, Orde Baru banyak melibatkan ABRI terutama Angkatan Darat baik secara institusi maupun secara personal tokoh-tokohnya. Salah satunya ialah dengan reorganisasi ABRI yang kemudian menciptakan jabatan panglima ABRI yang amat strategis.

Jabatan pangab ini sendiri diciptakan pada tahun 1969. Setelah dikonsepsikan oleh Jenderal Soemitro, kemudian diumumkan oleh Jenderal Soeharto pada tanggal 5 Oktober 1969 beserta formasinya yang sudah ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 1969. Reorganisasi ABRI ini dimaksudkan untuk menarik fungsi politik ke Departemen Pertahanan dan Keamanan (Menhankam). Dengan demikian setiap angkatan dikoordinasikan ke dalam kekuasaan Menhankam yang merangkap sebagai Panglima Angkatan Bersenjata (pangab) yakni Jenderal Soeharto sendiri.

Hal tersebut merupakan salah satu upaya kontrolisasi militer agar bisa menjadi salah satu power di bawah Orde Baru dan sebagai power guna menghadapi sisa-sisa anggota PKI ketika itu. Perubahan struktur tersebut pula menjadikan pangab sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari semua angkatan, sedangkan setiap angkatan dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan yang lalu kehilangan fungsi komandonya dan tidak memiliki akses keuangan yang sudah dipusatkan pada menteri pertahanan dan keamanan/panglima ABRI²⁷.

Untuk menghadapi sisa-sisa kekuatan PKI maka Soeharto mengubah struktur ABRI dengan mempersatukan masing-masing angkatan di bawah Menhankam. Dengan dihapusnya Menteri Panglima AD (Menpangad), Menteri

²⁷ Ramadhan K.H., *Soemitro, Mantan Pangkopkamtib : dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994. Hal 174-180.

Panglima AL (Menpangal), Menteri Panglima AU (Menpangau), dan Menteri Panglima Kepolisian (Menpangak), lalu jabatan itu diubah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU), dan Kepala Polri (KAPOLRI) yang dalam rangka pembinaan kesatuan bertanggungjawab langsung kepada panglima ABRI²⁸.

Jadi setelah reorganisasi tersebut, Soeharto pernah menduduki tiga pangkat strategis yakni sebagai Pangkopkamtib dan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus sebagai Panglima ABRI. Hal ini memberi ruang kepada Soeharto untuk mengubah pula tatanan orang yang menjabat tersebut guna membuat sebuah basis kekuatan yang lebih kokoh dalam struktur ABRI²⁹.

Setelah setahun diangkat menjadi presiden RI, pada tahun 1969 Soeharto menyerahkan jabatan Pangab kepada Jenderal Maraden Panggabean dan jabatan Pangkopkamtib kepada diserahkan kepada Jenderal Soemitro untuk melaksanakan operasi pemulihan keamanan dan ketertiban pasca G 30 S. Adanya pemisahan antara jabatan Pangab dan Pangkopkamtib ini dimaksudkan agar Jenderal Panggabean tidak dapat melakukan langkah-langkah monopoli yang membahayakan posisi Soeharto, dan Jenderal Soemitro hanya melaksanakan tugas operasi pemulihan kemananan dan ketertiban yang langsung bertanggungjawab kepada Pangti ABRI yakni Soeharto sebagai Presiden RI.

Kondisi tersebut menimbulkan kecemburuan di kalangan perwira dari Korps Perwira Angkatan Darat secara tertutup karena kekuasaan operasional Jenderal Soemitro amat luas sedang yang lain hanya pembinaan ke dalam materil,

²⁸ Kivlan Zen, *Konflik dan Integrasi TNI-AD*, Institute For Studies Police, Jakarta, Hal.64

²⁹ Salim Said, *Militer Indonesia dan Politik, dulu, kini dan kelak*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal.57.

teritorial dan personal saja. Namun pertikaian internal dalam MABES AD tidak mungkin lagi terjadi secara terbuka seperti sebelumnya. Hal ini karena Soeharto sebagai mantan panglima AD, Panglima ABRI dan sebagai Presiden amat mengerti strategi untuk mengendalikan pasukan. Selain itu, ia juga menetapkan mekanisme bahwa setiap pengangkatan Kolonel sampei Jenderal harus atas persetujuan Presiden melalui Keppres (Keputusan Presiden). Akibatnya, tidak ada lagi otonomi angkatan tetapi prosedurnya melalui hirarki dan Dewan Jabatan dan Kepangkatan (WanJak) atau Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) MABES ABRI³⁰.

ABRI pada masa Orde Baru merupakan salah satu dari basis kekuatan pendukung Soeharto. Dengan doktrin dwifungsi ABRI, DPR diisi khusus 20% oleh perwakilan ABRI sebagai realisasi kebijakan dwifungsi tersebut. Kondisi ini tentunya menguntungkan pemerintah dalam segi legislasi pembuatan undang-undang dan ketika dihadapkan pada setiap pemilu. Maka militer menjadi salah satu kaki penguat Orde Baru yang membuatnya mampu bertahan selama beberapa periode pemerintahan.

Memasuki awal 1990 militer melakukan konsolidasi baik dalam jajaran ABRI maupun dengan pemerintah, namun militer tidak merasa puas dengan hasil yang dicapai, salah satu masalah yang hangat di bicarakan dalam kalangan militer pada waktu itu adalah kalangan militer tampaknya kurang antusias terhadap pencalonan kembali Presiden Soeharto, militer cenderung mengharapkan kepemimpinan yang berbeda.

³⁰ Salim Said, *Ibid.* Hal. 62.

Soeharto menyadari bahwa militer mulai mampu memainkan peran politik terlepas dari kontrolnya dan dukungan terhadapnya mulai menurun. Untuk mengembalikan kemampuan kontrolnya terhadap militer maka Soeharto mulai menjalankan strateginya dengan mengganti pada beberapa posisi penting dalam tubuh ABRI, yaitu dengan mengangkat Jendral Feisal Tanjung sebagai pangab dan Jenderal Hartono sebagai KSAD, yang keduanya berasal dari keluarga santri dan dekat dengan golongan Islam (ICMI).

Senada dengan pernyataan diatas, Hefner, menyatakan pembangkangan yang dilakukan militer menyebabkan Soeharto marah dan ia bertekad memberikan pelajaran kepada pimpinan militer, kebanyakan pengamat menilai bahwa berdirinya ICMI sebagai hukuman Presiden terhadap pimpinan ABRI. Selain itu berdirinya ICMI juga merupakan upaya presiden untuk meraih dukungan dari umat Islam sebagai pengganti kekuatan dukungan dari ABRI di bawah pengaruh sosok L.B Moerdhani. Moerdhani memang sudah tidak memiliki jabatan strategis ketika itu tapi pengaruhnya dalam tubuh angkatan bersenjata masih sangat kental.

Soeharto menganggap bahwa orang Islam yang terorganisir dalam ICMI sebagai sekutu politik yang semakin penting. Pendekatan pemerintah terhadap ICMI tidak disukai oleh pemimpin ABRI. Harold Crouch mengatakan bahwa sikap baik ABRI terhadap ICMI belum tentu meresap ke dalam tubuh ABRI yang curiga terhadap organisasi-organisasi Islam yang dianggap berbau neo-Masyumi. Ketidak senangan terhadap ICMI karena ICMI yang berdiri pada awal tahun 1990 dengan Habibie sebagai ketua umumnya berasal dari kalangan aktifis muslim yang menjadikan ICMI sebagai kendaraan untuk mendesak tatanan politik baru yang tidak tergantung pada militer dan mencerminkan kepentingan muslim.

pernyataan-pernyataan Habibie setelah selesai berbicara di hadapan para perwira militer menunjukkan keinginan adanya tataan baru di mana sipil mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki kepemimpinan nasional.

Ketegangan yang semakin memuncak antara presiden dan militer membantu menjelaskan reaksi keras pimpinan militer terhadap ICMI, sejak dari awal elit-elit militer berembuk untuk mengagalkan disahkannya ICMI. Namun di pihak lain ada beberapa elit-elit militer yang akomodatif dengan ICMI, selain mereka juga telah di rangkul oleh Soeharto sebagai strategi untuk mengimbangi kekuatan militer yang kontra terhadapnya. Maka kemudian terjadi faksionalisasi di tubuh militer yang menghasilkan dikotomi militer yang merah-putih dan militer yang hijau.

B. Hubungan ABRI Dengan Golongan Islam Hingga Awal Tahun 1990-an

Di Indonesia, sejarah mencatat bahwa tentara (yang selanjutnya menjadi ABRI) lahir dari sipil yang mayoritas beragama Islam. Namun dalam perjalanannya banyak peristiwa yang membentrokkan antara sipil yang mayoritas Islam dengan ABRI sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

Pada tahun 1984, Presiden Soeharto memutuskan untuk ‘berubah haluan’. Kemudian ia melakukan upaya Islamisasi, melalui berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 1990. Sebagai seorang militer dan karena tidak mau disebut berpihak kepada salah satu dari kedua organisasi Islam di atas, maka Soeharto memilih untuk tidak mengutamakan aspek budaya dari gerakan

Islam, melainkan lebih menekankan pada aspek kelembagaan/institusionalnya saja.

Sebelumnya, fraksi Islam mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya UU No.14/1970, yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Dengan UU ini, dengan sendirinya hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri.

Kemudian menyusul berdirinya MUI pada tahun 1975 yang segera berkembang dengan pesat, karena didorong oleh anggaran belanja teratur dari Departemen Agama dan oleh manuver-manuver politik Presiden Soeharto waktu itu. Ciri utama MUI sejak berdiri adalah kepengurusannya diisi oleh para pensiunan Departemen Agama dan nonpegawai negeri yang berposisi lemah.

Upaya penegakan hukum Islam ini membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988, Soeharto sebagai presiden menerima hasil kompilasi hukum-hukum Islam dalam bidang tertentu, dan menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama. Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU no. 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan.

Pada tahun 1991, Soeharto “merestui” berdirinya Bank Muamalat yang diprakarsai oleh ICMI dan MUI, dengan syarat tidak ada kata “Islam” dalam nama bank tersebut. Hal ini menandai upaya penerapan syariah dalam dunia ekonomi di Indonesia. ICMI sendiri direstui oleh Soeharto melalui Habibie pada tahun sebelumnya.

Menurut Gus Dur, upaya “Islamisasi” oleh Soeharto ini lebih mengarah ke birokratisasi gerakan Islam. Yang dimaksudkan dengan birokratisasi adalah keadaan yang berciri utama kepentingan para birokrat menjadi ukuran. Dengan demikian, hilanglah sedikit demi sedikit tradisi gerakan Islam yang mengutamakan posisi non-pemerintah. Kalau dahulu K.H. Hasyim Asy’ari dan kawan-kawan melawan pemerintahan kolonial dengan keputusan-keputusan agama murni, karena mereka bukan pegawai negeri, maka kini hilanglah tradisi itu sedikit demi sedikit.

Upaya yang dilakukan oleh Soeharto memang nampak sebagai upaya untuk menenangkan umat Islam setelah tragedi Tanjung Priok, Aceh dan beberapa insiden lain yang berpotensi memicu kemarahan umat Islam. Dari sisi lain, upaya ini dapat dipandang sebagai usaha politik efektif yang dilakukan oleh cendekiawan Muslim untuk mewarnai Indonesia dengan simbol-simbol ke-Islaman.

Perihal awal terjadinya konflik tentara-sipil, beberapa orang berbeda pendapat. Pendapat pertama adalah ketika terjadi peristiwa pengepungan Istana pada tanggal 17 Oktober 1952, dimana ketika itu ribuan orang berunjuk rasa menyerbu gedung parlemen memporakporandakan sejumlah dokumen dan peralatan ruangan, sementara di sisi lain pasukan arteleri AD mengepung dan mengarahkan moncong-moncong senjatanya ke istana. Kepala Staf dan wakil Kepala Staf AD didampingi Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX menghadap Presiden Soekarno . mereka mendukung demonstran tentara untuk mendesak Presiden Soekarno membubarkan parlemen (sementara). Mereka juga

menolak campur tangan politikus sipil, terutama yang berasal dari PNI di parlemen ke dalam urusan intern tentara³¹.

Sesaat setelah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1957-1958, Indonesia mengalami krisis tenaga ahli yang harus menggantikan tenaga ahli Belanda untuk dipekerjakan di perusahaan-perusahaan tersebut. Maka mengisi kekosongan itu, pemerintah melibatkan tentara untuk turut membantu mengelola perusahaan-perusahaan Belanda yang telah diambil alih. Dalam hal ini, keterlibatan tentara tentu dipermudah mengingat Perdana Menteri Djuanda dalam kabinet Karya ketika itu juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Sejak saat itulah tentara melakukan peranan gandanya yaitu sebagai tentara dan sebagai pengelola perusahaan³².

Dalam hal bisnis, sudah tentu persaingan para tentara adalah para pedagang China yang sejak lama tinggal di Indonesia. Pada akhir tahun 1959, tentara diuntungkan dengan adanya ketetapan larangan dagang di pedesaan untuk orang-orang China, Arab dan India yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 1960. Dengan dalih itu pula pihak tentara mulai memindahkan orang-orang China secara paksa dari pedesaan ke kota-kota, bahkan sekitar 119.000 orang dipulangkan kembali ke China hingga menimbulkan tekanan diplomatik dari pemerintah China pada Jakarta³³. Pada era ini, satu sisi pihak Islam diuntungkan karena pesaingnya di dunia bisnis berkurang. Sejak SDI sampai saat itu, para pedagang muslim memang selalu bersaing dengan bangsa China dalam bisnis.

³¹ Muhammad hisyam, *Krisis masa Kini dan Orde Baru*, Hal.100

³² Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda*, : 2001. Hal.86

³³ Marwati D.P dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia jilid vi*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008. Hal. 554-555

Pada masa orde baru, peranan ABRI tidak terlepas dari salah satu pemikir intelejen bernama Ali Murtopo. Hampir semua posisi dan karir yang didudukinya, berkaitan dengan upaya menyingkirkan peranan umat Islam dan memberangus gerakan Islam. Pada pemilu tahun 1971, Moertopo memobilisasi kekuatan militer untuk menekan para mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk memilih Golkar. Sedangkan saat menjabat sebagai Kepala Operasi Khusus (Opsus), lembaga yang dikenal angker pada saat itu, Ali Moertopo banyak melakukan upaya-upaya penyusupan (desepsi, penggalangan dan pemberangusan gerakan Islam).

Siasat Pancing dan Jaring digunakan oleh Moertopo untuk menyusup ke kalangan Islam, melakukan pembusukan dengan berbagai upaya provokasi, kemudian memberangusnya. Beberapa peristiwa seperti Komando Jihad, tragedi Haur Koneng, penyerangan Polsek Cicendo, Jamaah Imran, dan Tragedi pembajakan pesawat Woyla, tak lepas dari siasat licik Moertopo. Stigma "ekstrem kanan" yang ditujukan kepada umat Islam dan "ekstrem kiri" yang ditujukan kepada anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), juga hasil dari kerja jaringan intelijen dengan sosok sentral seorang Ali Moertopo³⁴.

Gerakan Islam dipancing, kemudian dijaring dan diberangus. Sebagian yang terpancing dengan taktiknya, dikendalikan kemudian digalang untuk bekerjasama dengan penguasa. Pada peristiwa Komando Jihad misalnya, simpatisan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII), dipropaganda dan dimobilisasi oleh Ali Moertopo untuk melakukan perlawanan terhadap ancaman

³⁴ 'Ali dan Islam, dikumpulkan lalu dilumpuhkan' dalam Majalah Tempo edisi Khusus 'Rahasia-rahasia Ali Moertopo', 14-20 Oktober 2003 Hal 92-94.

Komunis dari Utara (Vietnam). Ali Moertopo kemudian mendekati beberapa orang tokoh DI, yaitu Haji Ismail Pranoto, Haji Danu Muhammad Hassan, Adah Djaelani, dan Warman untuk menggalang kekuatan umat Islam, yang memang sangat memendam luka sejarah terhadap gerakan komunisme di masa sebelumnya.

Setelah ribuan umat Islam termobilisasi di Jawa dan Sumatera, dengan siasat kecerdasannya, Moertopo kemudian menuduh umat Islam akan melakukan tindakan subversif dengan mendirikan Dewan Revolusi Islam lewat sebuah organisasi "Komando Jihad (KOMJI)". Mereka kemudian digulung dan dicap sebagai "ekstrem kanan". Istilah "Komando Jihad" muncul pada tahun 1976 sampai 1982. Selain KOMJI, rekayasa intelijen juga terlihat jelas dalam kasus Jamaah Imran, Cicendo, dan pembajakan pesawat DC-9 Woyla. Jamaah Imran adalah kumpulan anak-anak muda yang dipimpin oleh Imran bin Muhammad Zein, pria asal Medan. Aktivitas kelompok yang didirikan pada 7 Desember 1975 ini berpusat di Bandung, Jawa Barat³⁵.

Kelompok Imran ini berobsesi ingin membangun sebuah komunitas Muslim yang melaksanakan syariat Islam secara murni. Untuk menjalankan misinya, menurut laporan intelijen, mereka mendirikan Dewan Revolusi Islam Indonesia (DRII). Istilah Jamaah Imran juga diberikan oleh aparat, bukan penamaan yang dibuat kelompok anak muda tersebut. Kasus Jamaah Imran mencuat ke publik saat terjadi penyerangan Polsek Cicendo, Bandung, pada 11 Maret 1981. Peristiwa itu bermula ketika polisi menahan anggota jamaah tersebut karena kasus kecelakaan. Kemudian mereka berusaha membebaskan anggotanya dengan melakukan

³⁵ Majalah Tempo edisi Khusus ' *Rahasia-rahasia Ali Moertopo* ', 14-20 Oktober 2003 Hal 96-97.

penyerangan bersenjata. Peristiwa berdarah itu menjadi legitimasi aparat untuk melakukan penangkapan anggota jamaah tersebut dan mengamankan anggota-anggotanya.

Peristiwa Cicendo berlanjut dengan aksi pembajakan pesawat terbang DC 9 Woyla GA 208 dengan rute Jakarta-Palembang pada Sabtu, 28 Maret 1981. Pembajakan tersebut dilakukan oleh lima orang anggota Jamaah Imran dengan membelokkan pesawat menuju Bandara Don Muang, Thailand. Drama pembajakan ini berhasil ditumpas oleh Pasukan Khusus TNI di bawah pimpinan LB Moerdani dan Sintong Pandjaitan. Setelah diusut, sikap radikal kelompok itu ternyata diciptakan oleh seorang intel ABRI yang bernama Johny alias Najamuddin yang menyusup dan aktif dalam Jamaah Imran.

Sosok Johny yang sudah diterima oleh jamaah tersebut kemudian melakukan beragam provokasi dengan menebar kebencian kepada ABRI. Johny kemudian 'membeberkan rahasia' ABRI yang dikatakan akan melakukan de-Islamisasi di Indonesia. Untuk itu, Johny merencanakan agenda besar: melakukan perlawanan terhadap ABRI. Di tengah sikap ABRI yang memang telah membuka front terhadap umat Islam, para anggota Jamaah Imran kemudian terbujuk dengan gagasan Johny.

Tanpa sepengetahuan para anggota jamaah lainnya, Johny membuat dokumentasi setiap aktivitas yang dilakukan jamaah tersebut. Dengan skenario licik, Johny kemudian membuat rencana untuk melakukan operasi pencurian senjata api di Pusat Pendidikan Perhubungan TNI AD pada 18 November 1980. Senjata curian itulah yang kemudian dilakukan untuk menyerang Polsek Cicendo. Anehnya, Johny yang telah menghasut anggota Jamaah Imran untuk menyerang

markas polisi tersebut, ternyata tak menampakkan dirinya lagi saat peristiwa terjadi. Bahkan saat polisi melakukan aksi besar-besaran untuk menangkap Jamaah Imran, hanya Johnny yang bisa lolos dari penangkapan tersebut.

Sosok Johnny akhirnya tewas dieksekusi anggota Jamaah ini di suatu tempat. Saat persidangan kasus ini digelar di pengadilan, majelis hakim menolak untuk membuka identitas Johnny. Selain itu, Jaksa penuntut umum juga selalu mementahkan usaha untuk mengorek identitasnya lebih dalam. Jenderal Soemitro, seniornya Ali Moertopo di lingkungan militer, dalam biografinya menyebut kasus Jamaah Imran, peristiwa penyerangan terhadap Golkar di Lapangan Banteng, dan pembajakan Pesawat Woyla sebagai rekayasa Opsus (Operasi Khusus) Ali Moertopo yang menerapkan strategi gerakan "Pancing dan Jaring".

Dalam kasus Jamaah Imran, Opsus memakai tokoh Imran yang bernama asli Amran. Selama lima tahun Imran dibiayai oleh Ali Moertopo belajar di Libya untuk mempelajari Islam dan ilmu terorisme. Imran Kemudian dimunculkan sebagai sosok yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia kembali. Soemitro juga menceritakan, laporan intelijen menyebut tujuan operasi Woyla untuk menggulingkan pemerintahan Soeharto dan mendiskreditkan umat Islam. Operasi ini ingin memunculkan kesan bahwa kelompok Islam cenderung radikal dan masih memiliki keinginan untuk mendirikan negara Islam seperti halnya DI/TII dan gerakan separatisme atas nama Islam lainnya.

Inilah yang kata Soemitro disebut sebagai teori Pancing dan Jaring, dimana umat Islam dirangkul terlebih dahulu, lalu didorong untuk memberontak, baru kemudian ditumpas sendiri oleh tim Opsus yang telah mengawasinya.

Jenderal Soemitro menceritakan, "Kecurigaan saya terhadap kasus Woyla, mulai muncul, ketika ada laporan bahwa sebetulnya Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) Jenderal TNI M Jusuf akan membawa Awaloedin Djamin yang notabene memiliki pasukan anti-teror untuk menyelesaikan kasus pembajakan dan teror ancaman pada awak pesawat tersebut"³⁶.

Namun, rencana itu tiba-tiba berubah tanpa sepengetahuan Jusuf, tidak tahu siapa yang mengubahnya. Akhirnya yang berangkat bukan lagi pasukan Awaloedin Djamin, melainkan pasukan RPKAD yang dipimpin Sintong Pandjaitan.

Ini yang menjadi pertanyaan sampai sekarang, mengapa RPKAD yang berangkat, bukannya polisi. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kemungkinan ada dua komando, yakni yang langsung ke jalur Pangab, dan satunya lagi: jalur komando dari tokoh layar belakang yang tidak terungkap³⁷.

Untuk melancarkan langkah-langkah politik Islamophobia, kelompok militer anti-Islam yang dikomandoi oleh Ali Moertopo mendirikan sebuah lembaga *think tank* bernama *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) pada 1 September 1971, bermarkas di Tanah Abang III, Jakarta Pusat. Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani (penasihat kebatinan Soeharto) menjadi sosok yang berada di belakang CSIS. Lembaga ini kemudian membuat masterplan pembangunan Orde Baru yang sangat menguntungkan pemerintah dan kelompok pendirinya.

Sementara gerakan Islam dianggap sebagai bahaya yang mengancam NKRI karena dituduh melanjutkan cita-cita mendirikan Negara Islam. Mereka masih menjadikan isu "Darul Islam" sebagai jualan untuk memberangus gerakan

³⁶ Heru Cahyono, *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan peristiwa 15 Januari '74*. Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1998. Hal. 134-136

³⁷ Heru Cahyono, *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998. Hal 90-99.

Islam. Selain pula mewaspadaikan kebangkitan Islam politik yang pada masa lalu direpresentasikan melalui kekuatan yang terhimpun dalam Partai Masyumi.

Pemerintah yang ketika itu mabuk kekuasaan dan tentara yang diindoktrinasi untuk mewaspadaikan ancaman terhadap kebhinekaan Pancasila, kemudian termakan isu tersebut, sehingga memposisikan umat Islam sebagai bahaya. Agenda politik kelompok anti Islam ini berhasil menciptakan konglomerasi dan gurita bisnis antara penguasa dan pengusaha. Di antara jaringan bisnis tersebut adalah Pan Group milik Panlaykim dan Mochtar Riady, PT Tri Usaha Bakti milik Soedjono Hoemardani, Pakarti Grup milik Lim Bian Kie dan Panlaykim, dan Berkat Grup milik Yap Swie Kie serta lain-lainnya.

Masuknya kekuatan konglomerat dalam lingkaran Orde Baru membuat rezim tersebut semakin kuat. Karena itu, ada yang mengatakan bahwa Orde Baru dibangun oleh empat pilar kekuatan, yaitu ABRI, Birokrat, Golkar dan konglomerat. Keempat pilar tersebut memainkan peran penting dalam memarjinalkan peran politik umat Islam saat itu. Kolaborasi rezim Orde Baru dengan pengusaha Katolik/Cina di antaranya dengan membuat kebijakan yang memotong urat nadi ekonomi umat Islam dan menghidupkan kelompok kecil Cina keturunan³⁸.

Sentra-sentra ekonomi umat Islam seperti di Pekalongan, Solo, Pekajangan, Majalaya, dan lain-lain, dengan aneka kebijakan pemerintah dapat dikerdilkan. Jaringan perbankan dan sektor keuangan lainnya juga berhasil

³⁸ Nugroho Notosusanto, Hubungan Sipil-Militer dan Dwifungsi ABRI. Pusat Sejarah ABRI, 1974. Hal.25

mereka kuasai. Karena itu, ketika Orde Baru berkuasa, gurita bisnis kelompok ini begitu perkasa dan dapat memengaruhi kebijakan pemerintah.

Mengenai masalah suksesi pemerintahan Soeharto dan bagaimana peran militer di dalamnya, berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Salim Said, bahwa diawali terjadinya konflik dalam kalangan militer yang kecewa terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Soeharto. Dukungan ABRI yang sangat menonjol terhadap GOLKAR dalam pemilu 1977 dipertanyakan oleh kalangan perwira Seskoad (sekolah staf komando angkatan darat) di Bandung lewat sebuah makalah –dikenal dengan sebutan seskoad paper- yang mencerminkan para pendapat perwira seskoad, mereka mendesak agar ABRI menahan diri dari keberpihakan pada pemilihan umum di masa depan. Para perwira tersebut juga menyarankan agar ABRI sebagai kekuatan penuh tidak berpihak kepada kelompok manapun dalam masyarakat. ABRI semestinya tetap berdiri di atas semua golongan dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia³⁹.

Pernyataan para perwira seskoad ini mendapatkan dari para purnawirawan yang tergabung dalam Fosko (forum studi dan komunikasi). Fosko sependapat dengan apa yang ditulis oleh para perwira seskoad yang pada intinya menyerukan agar nilai-nilai moral angkatan bersenjata Indonesia berada di atas semua golongan harus selalu dijaga. Mendengar pernyataan demikian Soeharto jelas tidak sependapat. Dalam rapat pimpinan ABRI di Pekan Baru, Soeharto menyatakan dengan tegas ABRI akan mendukung Golkar dan tidak berdiri di atas

³⁹ Sri Bintang Pamungkas, *Ganti Rezim ganti Sistem; Pergulatan Menguasai Nusantara*, Jakarta, El-Bisma 2014. Hal 23-27

semua kelompok sosial politik jenderal Widodo dan jenderal M.Yusuf yang merupakan penggerak Fosko dipecat dari jabatannya sebagai panglima ABRI.

C. Istilah ABRI Hijau dan ABRI Merah Putih

Adanya istilah ABRI Hijau dan ABRI Merah Putih di Indonesia merupakan hal yang diperdebatkan oleh beberapa tokoh karena setiap tampil di muka umum para perwira ABRI selalu mengatakan bahwa kami adalah satu.

Bagi yang menafikkan, mereka berpendapat bahwa analisis mengenai "ABRI Hijau" dan "Islam dan Militer" dalam perpolitikan di Indonesia dewasa ini adalah sangat kabur mengingat kelompok militer yang sering disebut sebagai "Faksi Hijau" bukanlah benar-benar Islami. Mereka tidak bertindak atas dasar prinsip ke-Islam-an, namun tetap bertindak atas dasar doktrin militer. Dengan demikian, penggunaan label "hijau" sebenarnya tidak tepat. Begitu pula, sebaliknya, label "merah-putih" terhadap kelompok militer lainnya. Mereka juga tidak bertindak atas dasar paham nasionalisme melainkan atas dasar doktrin militer. Bahkan istilah "faksi" atau "perpecahan" di antara keduanya pun tidak benar karena mereka memang masih dalam satu komando dan satu doktrin/paham. Kenyataan yang ada adalah persaingan karir di antara para jenderal tersebut. Lebih jauh, karena dua kelompok ini selalu mempunyai konflik kepentingan, analisis adanya faksi "Hijau" versus "Merah-Putih" dalam ABRI telah membuat kesan seolah kini sedang terjadi konflik yang tajam di antara mereka.

Di beberapa negara lain, faksionalisme dalam tubuh militer diakui kebenarannya oleh beberapa tokoh seperti Letjen TNI (pur) Hasnan Habib

mengungkapkan istilah hijau dan merah putih ini muncul pada awal 1990. Tepatnya saat hubungan mantan Presiden Soeharto dengan kelompok-kelompok Islam, termasuk ICMI, tengah mesra-mesranya. Puncaknya, ketika R. Hartono menjadi KSAD, Feisal Tanjung menjadi Pangab, dan Letjen (pur) Prabowo Subianto memegang kendali Kopassus. Itulah trio jenderal yang mengawali bangkitnya ABRI hijau. Sebab, sejak lama, ketika posisi kunci ABRI dipegang Benny, perwira-perwira yang berbasis Islam sulit mendapatkan tempat. Inilah yang membangkitkan kesadaran Hartono cs untuk membela kepentingan kelompoknya yang sudah lama dipinggirkan. Alasan Hartono menaikkan kelompok Islam juga wajar karena memang jumlahnya mayoritas. Hasnan pun menuturkan di Indonesia faksionalisme itu tidak terlalu ekstrim jika dibandingkan di Filipina. Di Filipina, yang masuk kelompok hijau hanya bisa menikmati pangkat tertinggi kolonel. Jenderal-jenderal dikuasai oleh ABRI nasionalis.

Pandangan tersebut searah dengan pendapat Cendekiawan Barat, William Liddle, yang dalam artikel berjudul *Indonesia: Suharto's Tightening Grip* memaparkan bahwa di dalam tubuh angkatan bersenjata juga terdapat perpecahan antara perwira-perwira yang Islami (hijau) dan yang nasionalis sekular (merah putih).

Adanya faksional dalam tubuh ABRI merupakan fenomena penting yang dipengaruhi oleh sosok-sosok yang sebelumnya memegang jabatan tinggi dalam institusi tersebut. William Liddle memiliki pendapat menarik ketika menganalisa tentang kehidupan sosial pada masa Orde Baru. Ia mengungkapkan bahwa yang menentukan kehidupan sosial bukanlah struktur melainkan adalah pelaku. Atau lebih tepat, dampak struktur tak pernah terpisahkan dari persepsi, kemauan, dan

tindakan para pelaku politik. Dalam kata lain, yang bertindak langsung bukanlah struktur, melainkan manusia, individu-individu, dan dampak struktur selalu dibentuk atau dipengaruhi oleh manusia itu.

Struktur beserta tugas dan aturan yang ada di dalamnya bisa sebagai pembatas gerak, namun yang melakukan penafsiran, tindakan dan juga penentu strategi gerak adalah individu-individunya. Misal dalam hal peranan ABRI dalam politik Indonesia, yang bergerak bukanlah lembaganya melainkan para perwira yang suatu waktu mengisi jabatan-jabatannya. Tindakan mereka dibentuk dan dipengaruhi, meskipun tidak ditentukan, oleh struktur⁴⁰. Inilah alasan pentingnya pemilihan sosok untuk menduduki sebuah jabatan terlebih dalam hal yang amat strategis. Feisal Tanjung ketika dipilih oleh Soeharto pun tak lepas dari sosoknya yang dianggap cocok untuk menempati posisi Panglima ABRI bagi Soeharto.

Dalam beberapa hal dapat diamati bahwa pengelompokan itu memang ada, salah satunya adalah dari pidato Theo Syafei, mantan Pangdam Udayana. Beliau mengatakan bahwa Mayjen TNI Zacky Anwar Makarim adalah kepala Badan Intelijen ABRI (Ka BIA) yang tidak “diutak-atik” (digeser) karena kakaknya, Nono Anwar Makarim, di ICMI. ”Atase Pertahanan Amerika Serikat Kolonel William pernah menuturkan kalau ingin bertemu dengan Zacky, di situ selalu ada Sjafrie Sjamsoeddin, Prabowo Subianto, dan Kahirupan. Jadi, empat ini selalu ada. Mereka bersahabat. Mereka sekawan, empat sekawan,” kata Theo.

Theo melanjutkan, Kahirupan sudah dikeluarkan oleh R. Hartono karena dia nonmuslim. Prabowo sudah di-DKP-kan. Sjafrie sudah mulai ditanya-tanya.

⁴⁰ William Liddle menulis uraian pemikirannya tentang peranan individu dan struktur, dalam hal ini ABRI dalam dinamika politik orde baru, ketika memberikan kata pengantar dalam buku Eep Saefullah Fatah '*Zaman Kesempatan*' terbitan Pustaka Mizan, 2000. Hal.xii.

Kenapa tinggal Zacky Anwar, kenapa dia tidak bisa diutak-atik Padahal, dia adalah Ka BIA. Sebab, Zacky Anwar mempunyai kakak yang bernama Anwar Makarim. Dia ini adalah salah satu ketua ICMI”. kata Theo.

Dari sini bisa diketahui, kelompok hijau ini memang mempunyai hubungan khusus dengan ICMI. Hubungan ini menjadi jelas ketika R. Hartono dulu mendaftarkan diri menjadi anggota ICMI. Ketika itu, pengamat politik Dr. Amir Santoso mengatakan masuknya Hartono ini bisa menarik jenderal lain untuk juga menjadi anggota ICMI. Dalam kaitan ini, Hasnan berpendapat, saat Feisal menjadi Pangab, tidak sedikit perwira ABRI yang sekurang-kurangnya ikut mendukung ICMI karena alasan karier. Meskipun bukan ICMI, asal memiliki komitmen dengan Islam, mereka masuk kelompok ABRI hijau ini. Istilah yang biasa dipakai di kelompok ABRI hijau ini adalah: Kelompok kita. Setiap mereka bertemu selalu mengucapkan salam (assalamualaikum).

Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan didirikannya ICMI pada akhir 1991, Soeharto semakin terlihat mendekat ke kelompok Islam⁴¹. Perubahan arah politik itu mendapat penilaian yang berbeda dari banyak tokoh. Gus Dur misalnya, menilai hubungan antara Soeharto dengan kalangan Islam yang semakin menghangat, terutama dengan ICMI lebih merupakan pukulan mendahului terhadap para penentangannya yang berbahaya dalam tubuh Angkatan Bersenjata⁴².

Di akhir-akhir masa jabatannya, ada fenomena menarik mengenai Soeharto, yaitu kedekatan Soeharto dengan kelompok Islam. Feisal Tanjung dan R. Hartono merupakan jenderal yang berasal dari keluarga

⁴¹ Ida, Laode, *Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.1996. Hal.70.

⁴² R.William Liddle, *Indonesia's Threefold Crisis*, dalam ‘ *Journal Of Democracy*’, vol.3, No.4, October 1994, Hal.62.

muslim yang taat. Diangkatnya kedua jenderal ini merupakan suatu hal yang menarik. Sebab, ABRI di bawah Soeharto, senantiasa di pimpin oleh para perwira Jawa dengan latar belakang abangan atau para perwira dari kelompok minoritas. Fenomena baru adanya pemimpin militer dari kalangan Islam yang taat dan pembentukan ICMI, serta keterlibatan Soeharto dalam urusan ini, telah menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat. Kemudian tersebar isu adanya usaha “penghijauan” dalam tubuh Golkar dan ABRI. Di akhir tahun 1990an, merebak isu adanya “golongan merah putih”. Golongan ini di anggap sebagai lawan politik dari “golongan hijau” yang identik dengan kelompok Islamis.

Kedekatan Soeharto dengan Islam, banyak kalangan yang menilai ia mulai menjauh dari ABRI, namun pendapat yang oleh Jamie Mackie, Andrew Macintyre, R. William Liddle dan Ulf Sundhausen tentang hubungan Soeharto dengan militer lebih meyakinkan di banding pendapat yang menyatakan Soeharto sedang memperlemah dan menjauh dari ABRI, dan memanipulasi kelompok Islam untuk menghadapi ABRI. Menurutny, kepemimpinan Soeharto sebagian besar berasal dari penguasaannya atas ABRI.

Sebagai mantan jenderal dan pimpinan angkatan darat, presiden Soeharto senantiasa mengidentifikasikan dirinya sangat dekat dengan ABRI. Ia menggantungkan dirinya pada ABRI, walaupun ia juga membuat para pemimpin ABRI tergantung padanya untuk mendapatkan jabatan.

Pergantian Pangab dari Edi Sudradjat kepada Feisal Tanjung pada 1993 sempat menimbulkan pertanyaan besar. Saat itu, ada tiga perwira tinggi senior yang sedang berebut menggantikan posisi Edi Sudradjat: Feisal Tanjung dan Harsudiono Hartas serta Wismoyo. Namun keputusan jatuh pada Feisal Tanjung.

Feisal, yang memiliki kedekatan dengan kelompok hijau. Sejak itu muncul spekulasi, naiknya Feisal tidak lepas dari peran Habibie, yang saat itu naik daun karena memegang kendali ICMI.

Sementara itu, Soeharto yang masih dekat dengan kelompok Islam ingin memunculkan Habibie yang saat itu memegang jabatan ketua umum ICMI. Soeharto pun marah. Hartas, setelah SU MPR 1993, hanya diberi tempat di DPA, yang sering dipelesetkan menjadi "Dewan Pensiunan Agung". Naiknya Feisal menjadi Pangab kemudian diikuti naiknya Hartono, yang saat itu memegang jabatan gubernur Lemhanas, menjadi Kassospol menggantikan Hartas. Naiknya Hartono ini juga tidak lepas dari usaha kelompok Hijau. Sebab, Hartono, ketika masih Pangdam V/Brawijaya, memberikan gerak leluasa untuk ICMI mendeklarasikan diri. Hal ini memberikan petunjuk bahwa kelompok hijau ini mempunyai hubungan khusus dengan ICMI.

Bila para pengamat militer melihat awal pengelompokan merah putih dan hijau terjadi pada era 1990-an, sebenarnya, masih ada petunjuk lain yang mengindikasikan faksionalisme ini mulai terjadi pada awal 1980-an. Seperti yang ditulis Hartono Mardjono dalam buku Reformasi Politik Suatu Keharusan. Fungsionaris PPP yang sekarang aktif di Partai Bulan Bintang ini menulis pada 1983 bahwa pada saat jaya-jayanya, mereka menguasai kepemimpinan ABRI dan kepala-kepala bidang politik di pemerintahan daerah tingkat I dan II. Juga, posisi-posisi di lembaga intelijen. Kemudian mereka menyerbu dan merebut kepemimpinan Golkar yang ingin mereka jadikan mesin politik. Mereka juga menggarap FABRI. Hartono menggunakan kata "mereka" untuk merujuk pada

kelompok yang terdiri atas orang-orang sipil, birokrat, dan faksi tertentu di tubuh militer yang ingin menguasai kekuasaan.

Sejak awal Orde Baru, kelompok ini menjadi *invisible government* (pemerintah bayangan). Hartono menulis, mereka berhasil menempati pos-pos penting di lingkungan birokrasi dan ABRI. Pos-pos penting dalam ABRI, khususnya pimpinan, komandan-komandan pasukan, dan bidang-bidang intelijen ini mereka kuasai bertahun-tahun. Dia juga mengungkapkan bahwa pada 1983, banyak anggota ABRI yang masih aktif terpaksa dipensiunkan cepat karena harus menjadi fungsionaris Golkar. Gambaran yang ditulis Hartono ini jelas mengindikasikan adanya faksi tertentu di tubuh ABRI yang berbeda dengan ABRI-ABRI lain. Mereka mempunyai tujuan tersendiri.

Hartono mengatakan, istilah ABRI hijau dan ABRI merah putih ini sebenarnya diperkenalkan oleh mereka. Hartono yang pernah menjadi wakil rakyat ini juga menulis, mereka isukan bahwa masuknya cendekiawan dan eksponen-eksponen muslim ke pemerintahan, DPR, MPR, atau ABRI sebagai bahaya Islamisasi. "ABRI merah putih versus ABRI hijau mereka tebarkan untuk memecah belah bangsa dan persatuan ABRI dengan rakyat yang notabene mayoritas muslim," ungkap Hartono.

Pengamat politik asal Swedia Dr. Anders Uhlin menggambarkan dalam buku berjudul *Indonesia and The Third Wave of Democratization: The Indonesia Pro-Democracy Movement in a Changing World*. Dalam buku yang terbit 1997 ini, Uhlin menulis, mantan Pangab dan Menhankam Jenderal Benny Moerdani dikenal memiliki perselisihan dengan istana kepresidenan. Sejak Benny keluar dari ABRI pada 1988, Soeharto secara teratur ikut campur dalam

penunjukan orang-orang kunci di ABRI. Orang-orang yang loyal kepada Moerdani, secara sistematis, telah digantikan oleh orang-orang yang loyal kepada Soeharto. Ini menyebabkan kemarahan di kalangan para perwira. Jelaslah, ada juga pengelompokan antara orang-orang yang ditunjuk Soeharto di satu sisi dan para perwira non-Soeharto di sisi lain.

Pola hubungan antara politik dan ekonomi di Indonesia cenderung mengarah kepada politisisme. Hal ini ditunjukkan oleh Onghokham yang melihat bahwa sepanjang sejarah bangsa Indonesia ada pola bahwa penguasa baru akan membawa *money man* sendiri. Chatib Basri menunjukkan kecenderungan yang sama khususnya dalam kasus ABRI. Ia menggambarkan kaitan akumulasi kekuasaan dengan kapital sebagai salah satu keunikan Indonesia di bandingkan dengan negara lain. Dalam konsep yang konvensional menurutnya, hubungan kausal antara akumulasi kapital dan kekuasaan lebih difahami dari arah akumulasi kapital bisa mempengaruhi kekuasaan atau kebijakan. Kelompok bisnis yang besar misalnya memiliki kekuatan lobi untuk meminta proteksi. Tapi dalam kasus ABRI akumulasi kapital justru terjadi karena mereka memiliki kekuasaan. Surat keputusan dan lisensi dapat menjadi modal utama berjalannya suatu bisnis.

Dengan demikian peran militer dalam politik sangat menguntungkan juga secara ekonomi, sehingga militer berkepentingan untuk mempertahankan kondisi ini. Elemen penting kelangsungan kekuatan militer mendukung Orde Baru karena mereka berkepentingan untuk mempertahankan status quo yang berupa keluasan dalam mempengaruhi politik dan penghargaan ekonomi yang substansial.

Gerakan-gerakan yang ditimbulkan dari kelas bawah dan adanya upaya kebangkitan kelas menengah muslim, seperti dengan lahirnya ICMI jelas

menginginkan adanya perubahan kehidupan politik yang lebih terbuka. Demokratis dapat dilihat sebagai ancaman terhadap kepentingan politik dan ekonomi militer. Sehingga dalam pandangan militer kesadaran politik kelas bawah dan munculnya kelas menengah baru dari kalangan muslim dapat mengurangi kekuatan politik militer dalam meningkatkan kepentingannya.

Dengan demikian, dari perspektif analisis ekonomi politik militer sebagai upaya menjelaskan respon militer terhadap ICMI khususnya dan kebangkitan kelas menengah muslim pada umumnya, dapat dijadikan sebagai salah satu analisis untuk melihat bagaimana respon militer terhadap kebangkitan kelas menengah muslim.

D. Feisal Tanjung dan Pandangannya terhadap hubungan ABRI dengan Golongan Islam

Menurut Din Syamsuddin, beberapa pemikiran Feisal tentang hubungan ABRI dengan Islam yang perlu digarisbawahi antara lain:

1. Penegasan Feisal tentang peran penting agama dan ummat beragama khususnya ummat Islam, dalam pembangunan nasional akan menambah keyakinan ummat terhadap potensi mereka, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan peran sertanya dalam pembangunan. Dalam hal ini, panglima ABRI menghargai peran dan fungsi penting para pemuka agama sebagai tokoh panutan di masyarakat yang nantinya akan berpengaruh secara positif terhadap penguatan kemandirian ABRI-rakyat.

2. Penegasan Feisal Tanjung selaku panglima ABRI tentang hubungan integratif dan harmonis antara wawasan keagamaan dengan wawasan kebangsaan akan menjernihkan pandangan dikotomis antara keduanya yang hanya akan menimbulkan pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berbegara.

Dalam pandangannya, justru Feisal berharap bahwa muslim Indonesia bisa menjadi lebih cerdas menghadapi tantangan zaman, karena notabenenya kita lah negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia. Hal ini disampaikan dalam pidatonya tentang Fungsionalisasi masjid:

“Para pembaharu muslim mengambil inisiatif melakukan pembangunan kelembagaan modern Islam khususnya di bidang pendidikan, kebudayaan dan hukum. Bentuk pembaruan ini semakin nyata setelah era globalisasi. Betapa gairahnya pembaruan Islam diakui oleh pengamat Islam dari barat, John L. Esposito dengan mengatakan “Islam memiliki tradisi kebangkitan yang kaya dan juga pembaharuan”. Jika dunia barat berani mengakui bahwa Islam adalah agama pembawa pembaharuan, kenapa di tanah air sendiri masih ada individu atau kelompok yang berpikiran Islam secara sempit? Islam adalah agama kemajuan, prestasi dan kesuksesan.”⁴³

Bagi Feisal, muslim yang baik tentu bisa berintegrasi dengan segala komponen bangsa ini, apalagi ABRI yang memang lahir dari laskar-laskar rakyat pada zaman kemerdekaan lalu⁴⁴. Dalam sejarah perjuangan bangsa pun seringkali ABRI bekerjasama dengan ormas Islam untuk menjaga NKRI dari gerakan-gerakan yang mengancam eksistensi NKRI. Sebagai seorang muslim dan dibesarkan dalam keluarga Muhammadiyah, Feisal berpandangan positif terhadap hubungan ABRI dengan Umat Islam. Baginya, muslim yang baik tentu bisa

⁴³ Feisal Tanjung, *ABRI-Islam mitra sejati*. Pustaka Sinar Harapan, 1997, Hal 101.

⁴⁴ Feisal Tanjung, *Ibid*, Hal 34-35.

berintegrasi dengan segala komponen bangsa ini, apalagi ABRI yang memang lahir dari laskar-laskar rakyat pada zaman kemerdekaan lalu⁴⁵.

Dalam hal ini, sosok Feisal beranggapan bahwa tidak dapat dipungkiri umat Islam merupakan komponen pejuang kemerdekaan sejak masa penjajahan yang tidak seharusnya memisahkan pemahaman antara paham kebangsaan dengan paham keagamaan. Bahkan dalam Islam sendiri semangat cinta negara sudah tertanam sebagai salah satu bagian dari keimanan.

Kelompok sipil dan militer tidak harus selalu dikotomi secara rigid dalam patriotisme, apalagi keduanya mayoritas lahir dan besar dari rahim umat yang mayoritas Islam. Adapun perbedaan kewajiban dalam beberapa hal itu hanya bagian dari tugas sebagaimana fungsinya masing-masing.

Islam mengajarkan bela negara sesuai dengan kedudukan masing-masing, jadi antara sipil dan militer harus bersinergi dalam menjaga keutuhan negara dan bangsa Indonesia, bahkan dalam upaya penjagaan ini harus bersinergi pula dengan seluruh komponen bangsa yang tidak hanya berasal dari golongan muslim, sebagaimana dahulu Rosulullah mencontohkan dalam upaya pembelaan negara Madinah yang kala itu di huni tidak hanya oleh gogongan Islam saja.

Feisal juga mengungkit pentingnya peranan para tokoh agama dalam sinergitas militer dan umat Islam. Tokoh agama merupakan salah satu panutan penting dalam masyarakat Indonesia dalam hal wawasan bermasyarakat dan bernegara, terutama dalam budaya masyarakat paguyuban.

Dalam beberapa ceramahnya, Feisal mengungkit peran para ulama dan santri sejak zaman penjajahan hingga masa kemerdekaan dalam perjuangan

⁴⁵ Feisal Tanjung, *ABRI-Islam mitra sejati*. Pustaka Sinar Harapan, Hal 34-35.

Indonesia baik yang bersifat politik maupun sosial. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perjuangan kemerdekaan peranan tokoh-tokoh ulama sangat erat menggerakkan rakyatnya untuk selalu memperjuangkan haknya dan untuk keluar dari belenggu penjajahan, bahkan untuk keluar dari kejahiliyahan yang selalu membuat muslim mudah dikuasai oleh asing⁴⁶.

⁴⁶ Lebih lanjut tentang peranan ini dipaparkan dalam '*Kliping tentang Mukhtamar Muhammadiyah ke-43*', tahun 1995 no. 417 Hal.18-20.

BAB IV

PANGLIMA ABRI JENDERAL FEISAL TANJUNG: MEMPERERAT HUBUNGAN ABRI DENGAN GOLONGAN ISLAM (1993-1998)

A. Perubahan Internal ABRI di bawah Kepemimpinan Feisal

Selama menjadi panglima ABRI, terhitung pada hari pelantikannya, Sabtu, 22 Mei 1993, Feisal Tanjung banyak melakukan perubahan terhadap ABRI baik secara struktural maupun kultural. Adapun mengenai penjelasannya adalah sebagai berikut.

i. Perubahan Kultural

Tiga hari setelah dilantik sebagai Panglima ABRI, Feisal menyampaikan lima butir Perintah Harian Panglima ABRI dalam sebuah apel khusus. Yang menarik, salah satu poin perintah itu adalah perintah kepada seluruh jajaran prajurit agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sebagai sumber kekuatan dan keyakinan diri dalam melaksanakan tugas. Menurut Feisal, setiap prajurit harus memiliki kesadaran agama karena hal itu akan berpengaruh pada pelaksanaan Sapta Marga dengan sebaik-baiknya.

Pada masa kepemimpinan Feisal, para prajurit dibiasakan untuk mengucapkan *assalamu'alaikum* tanpa harus malu dan takut akan stigma negatif seperti yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Mereka boleh menyimpan sajadah di

kantor, meletakkan Al-Qur'an di rak buku, serta menjalankan agama sesuai dengan akidah dan kepercayaannya masing-masing⁴⁷.

Sebagaimana kita ketahui, pada dekade sebelumnya ucapan salam di muka umum dan penyimpanan perangkat keislaman dalam tempat dinas adalah hal yang tabu dan cukup identik dengan kelompok-kelompok tertentu yang biasanya bersifat separatis. Islam simbolik menjadi hal yang amat asing dalam kemiliteran, apalagi pada era Benni Moerdhani.

Di sisi lain, sebagai bentuk dukungannya dalam upaya menumbuhkan kesadaran beragama, Feisal juga menghadiri perayaan Natal Oikumene bersama tokoh-tokoh masyarakat dan para prajurit di berbagai daerah⁴⁸. Hal ini menandakan bahwa militer sangat mendorong seluruh pemeluk agama untuk beribadat dan siap menjamin keamanan mereka baik yang muslim maupun yang bukan muslim. Peran sebagai panglima ABRI membuat Feisal harus menjaga hubungan baik dengan seluruh komponen umat beragama sebagaimana sudah di rintis oleh para pendahulunya.

Sejak zaman Feisal Tanjung ini pula pengajian rutin di lingkungan ABRI mulai diadakan, bahkan masih rutin hingga sekarang. Pengajian ini berupa pekanan yang agendanya biasa diliput dalam harian ABRI. Dalam penuturan beberapa purnawirawan ABRI pun sejak era Feisal seluruh identitas keislaman tidak segan-segan lagi untuk digunakan. Seorang prajurit menjadi lebih percaya diri dalam menampilkan sisi-sisi religinya.

⁴⁷Usamah Hisyam, Ibid. hal.498

⁴⁸ Mengenai kehadirannya terdapat dalam dokumentasi 50 Tahun ABRI terbitan Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995, dimana ada beberapa foto yang dipublikasi dalam buku tersebut.

ii. Perubahan Struktural

Dalam perubahan struktural di internal ABRI, tentu tidak lepas dari rencana Soeharto melanjutkan wacana pada dekade sebelumnya. Hal ini terlihat ketika mengubah lembaga BAIS (Badan Intelijen Strategis) menjadi BIA sebagai lembaga Intelijen khusus militer tanpa banyak publikasi. Perampangan ini diupayakan untuk menjaga keprofesionalan intelijen karena sebelumnya dianggap memiliki rentang kerja yang amat luas⁴⁹.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pendirian BAIS erat kaitannya dengan sosok Benny Moerdhani dan lembaga tersebut amat rapi kerjanya dalam banyak operasi senyap terutama dalam fenomena PETRUS yang seringkali dikaitkan dengan operasi BAIS. Namun walaupun tidak pernah terbukti kaitannya dengan PETRUS, ucapan Soeharto sendiri mengisyaratkan keterlibatannya tersebut.

Pemerintah tidak pernah secara resmi mengumumkan siapa dalang di balik Petrus tersebut. Ketika masalah Petrus marak secara nasional Benny Moerdani hanya menyebutkan “*ada perang antar gang*” atau “*ada yang mati dengan luka peluru, karena melawan petugas*”. Presiden sendiri seolah membenarkan dalih untuk mengatasi kejahatan tersebut dengan mengatakan “*lalu ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja, itu shock therapy*”⁵⁰.

BAIS sendiri sebelumnya merupakan bentuk pusat intelijen strategis yang bernaung di bawah Mabes ABRI dengan ciri khas serba terpusat dan professional. Pelaksanaan operasionalnya sehari-hari dipegang oleh wakil ketua. Lembaga inilah yang menyaring semua kegiatan seperti melakukan screening untuk para

⁴⁹ Usamah hisyam, (Ketua Tim Penyusun), *Feisal Tanjung: Terbaik untuk rakyat, terbaik bagi Abri*, Jakarta: Dharmapena, 1999. Hal. 512-513

⁵⁰ Soeharto, *Pikiran, ucapan dan tindakan Saya*. PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1989, Hal. 100-101

calon anggota DPR/ MPR, calon pejabat tinggi negara, diplomat yang akan ditugaskan di luar negeri dan bahkan para pejabat BUMN⁵¹.

Sedangkan BIA lebih ciut geraknya dan anggotanya lebih sedikit. BIA tidak lagi di bawah komando panglima ABRI tetapi Kepala BIA dijabat oleh Assintel Kasum ABRI. Dengan demikian, BIA tidak akan menjadi lembaga tersendiri yang dengan mudah mempunyai gapaian kemana-mana. BIA nantinya lebih berperan sebagai pemberi saran bagi tindakan pencegahan terhadap gangguan kemantaban politik, ekonomi dan sosial.

B. Upaya Mempererat hubungan terhadap Ormas-ormas Islam

Selama menjadi panglima ABRI, Feisal sangat kerap bersilaturahmi terhadap kelompok Islam, baik yang menjadi parpol ataupun ormas. Hampir dalam setiap muktamar NU contohnya, ia menyempatkan hadir, atau minimal mengutus tentara lain sebagai perwakilan darinya. Begitu juga pada muktamar Muhammadiyah dan PPP. Bahkan tidak jarang ia memberikan ceramah keagamaan baik dalam acara-acara kelompok Islam di atas atau dalam mimbar shalat Jum'at.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dasawarsa terakhir kepemimpinan Soeharto, ia amat banyak membangun masjid di seluruh wilayah RI. Hal ini biasanya dibarengi dengan kehadiran Feisal dalam acara peletakan batu pertama atau pun sekadar hadir sebagai mubalig, untuk mendekatkan diri dengan kalangan sipil.

⁵¹ A.C.Manullang, *Terorisme dan Perang Intelejen*, Penerbit Manna Zaitun, 2006. Hal 302-303.

C. **Militer dan ICMI, Sebuah Hubungan yang Harmonis**

Sejak kelahiran ICMI pada Desember 1991, banyak yang menilai bahwa hal ini merupakan tanda keseriusan Soeharto untuk menggalang dukungan dari umat Islam. Tidak diragukan lagi bahwa kemunculan ICMI sebagai salah satu kekuatan baru dalam khazanah kehidupan politik di Indonesia sangat berpengaruh terhadap posisi tawar umat Islam di Indonesia, mengingat pada masa Orde Baru Islam selalu mengalami marginalisasi bahkan Islam mengalami depolitisasi. Islam hanya berkutat pada wilayah kultural sehingga tidak mempunyai kekuatan politik yang signifikan bahkan Islam cenderung di matikan. Hal ini menjadi ironis karena Islam merupakan agama yang penganutnya paling besar di Indonesia.

Sejak Soeharto mendirikan ICMI pula, banyak pihak mensinyalir hal itu sebagai perubahan orientasi politik dan pelepasan ketergantungannya pada pihak militer, sehingga hubungan militer dengan Habibie kurang baik. Militer termasuk kelompok yang kontra terhadap keputusan Soeharto yang mendirikan ICMI⁵².

Peristiwa politik ini dipandang oleh sebagian pengamat sebagai sebuah strategi yang dikembangkan oleh rezim Orde Baru untuk merangkul kekuatan Islam yang mulai menemukan momentum kebangkitannya. Kelahiran ICMI diyakini oleh sebagian pengamat sebagai strategi “birokratisasi” Islam, yang arti praktisnya adalah penjinakan umat Islam. Hal ini wajar, mengingat kekuatan pemerintah semakin menurun akibat friksi yang terjadi dengan kalangan militer.

Namun yang menarik adalah, beberapa pengamat lain seperti Robert W. Hefner dan M. Nakamura, melihat hal ini sebagai gejala lain. Hefner berpendapat bahwa tidak benar kalau ICMI dibentuk hanya sekedar untuk mensukseskan

⁵² Salim Said, *Militer Indonesia dan Politik*. Hal. 157.

pemilu 1992, atau mendukung kepemimpinan Soeharto ketika ia tidak lagi mendapat dukungan kuat dari militer. Hefner melihat Soeharto dan birokrasi benar mendapat konsensi politik dari ICMI, tetapi ia juga melihat bahwa ICMI pun mendapat konsensi politik dari pemerintah. Lebih dari itu Hefner tampak percaya bahwa sikap akomodatif kompromis yang dilakukan pemerintah terhadap umat - dengan restunya terhadap ICMI - merupakan buah dari perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat muslim itu sendiri, dimana kelas menengah sudah semakin kuat sehingga tidak mungkin diabaikan oleh pemerintah.

Hefner menunjuk kemunculan kelas menengah muslim ini ada hubungannya dengan gerakan keislaman di kampus-kampus perguruan tinggi umum yang kemudian menurutnya mereflesikan keislaman kaum pembaru, dan disanalah proses Islamisasi berlangsung. Untuk mendapatkan gambaran mengenai keislaman kelas menengah ini Hefner banyak bersandar pada persepsi keislaman dari kalangan pembaru itu sendiri dan kemudian di hipotesiskan bahwa keislaman semacam itu lah yang terdapat pada kelas menengah tersebut, dan menentukan pembentukan ICMI.

Dalam analisisnya mengenai kelas menengah, Hefner berpendapat bahwa dalam Indonesia baru, kelas menengah baru sedang mengambil bentuknya di daerah-daerah perkotaan yang sedang berkembang pesat sekarang ini. Universitas umum memainkan peranan yang sangat penting dalam perubahan ini. Disini Hefner menyebut salman ITB sebagai salah satu pos gerakan Islamisasi kampus yang dipimpin oleh Imaduddin Abdurrahim. Gerakan serupa juga muncul di kampus-kampus umum lainnya.

Hal yang menarik dari pengamatan mengenai kelas menengah, Hefner adalah bahwa kemunculan intelektual muda dari kalangan santri yang mendapatkan pendidikan yang memadai di Perguruan Tinggi umum tanpa kehilangan identitas keislaman mereka hingga memainkan peranan yang semakin penting di sektor birokrasi ataupun swasta. Karena kelas menengah yang diukur dari tingkat pendidikan yang diperoleh serta posisi yang diduduki maka Hefner sampai pada kesimpulan bahwa kelas menengah muslim sekarang telah muncul.

Setelah kelahiran ICMI, Feisal Tanjung kembali mendekati Menristek BJ Habibie dengan mengundangnya untuk berkunjung ke Mabes ABRI di Cilangkap guna menyampaikan pemikiran-pemikirannya tentang masa depan bangsa. Habibie merupakan profesional yang dimandatkan sebagai petinggi ICMI yang berlatar belakang islamis juga. Feisal Tanjung sering menyebutnya sebagai tukar pikiran sesama muslim. Namun kedekatannya tentu dianggap mewakili institusi masing-masing.

BAB V

KESIMPULAN

Hubungan ABRI dengan Umat Islam sejak berdirinya TKR pada 1945 mengalami dinamika yang menarik untuk diteliti. Satu sisi, ABRI lahir dari sipil yang mayoritas beragama Islam dan salah satu unsurnya adalah laskar-laskar dari pesantren. Namun pada dinamikanya banyak pemberontakan dan persinggungan oleh sekelompok umat Islam terhadap negeri ini, terutama dalam hal politik yang akhirnya membawa peranan ABRI sebagai pembela NKRI yang utama dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk berkonfrontasi dengan kelompok-kelompok tersebut.

Pada dekade terakhir pemerintahan Soeharto, pemerintah Orde Baru mulai memperbaiki hubungan dengan umat Islam. Salah satu yang harus diubah wajahnya tentulah ABRI. Mengingat dalam dekade sebelumnya terkesan ABRI cukup anti dengan beberapa kalangan Islam, bahkan sempat dipimpin oleh panglima Katolik yang tidak akrab dengan kaum muslim saat itu, maka tentu perlu ada perubahan citra baik personal pimpinannya maupun kultural geraknya dalam tubuh militer tersebut.

Kepemimpinan ABRI yang tidak akrab dengan Islam dan seringkali bentrok tersebut membuat friksional dalam internal ABRI dan memunculkan isu adanya “ABRI Hijau” dan “ABRI Merah Putih”, di mana “hijau” identik dengan yang dekat dengan Islam dan “Merah Putih” identik dengan golongan nasionalis yang dekat dengan Moerdhani.

Dalam hal ini, maka tampilnya sosok Feisal Tanjung sebagai Panglima ABRI memiliki arti yang cukup penting dalam konstelasi politik Orde Baru. Feisal yang tertarik dengan dunia militer karena masa kecilnya sering melihat tentara di sekitar tempat tinggalnya membuatnya memilih mendaftarkan diri di AMN dan menjadi angkatan 1961. Sosok Feisal yang berlatar belakang Muhammadiyah dan tidak berafiliasi secara personal pada panglima ABRI sebelumnya yang dinilai anti Islam menjadi sebuah makna sendiri bagi muslim Indonesia, baik golongan tradisional maupun modern, baik bagi kelompok Islam politik maupun gerakan-gerakan Islam lainnya. Dalam hal ini, Feisal merupakan sosok yang mengawali ‘penghijauan’ dalam tubuh ABRI.

Feisal mengubah tatanan internal ABRI baik secara struktural maupun kultural dengan tampilan yang lebih ramah terhadap umat Islam, baik sipil maupun kelompok politiknya. Walaupun tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai penggagas hubungan ABRI dengan umat Islam – dalam arti tokoh sebelumnya pun sebenarnya sudah melakukan hubungan dengan umat Islam – namun beberapa kebijakan dan cara yang Feisal tempuh dinilai lebih dapat diterima berbagai golongan muslim. Feisal juga mempererat banyak hubungan ABRI dengan berbagai golongan Islam di Indonesia yang sebelumnya kurang harmonis.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Feisal cukup berperan secara signifikan dalam hubungan Orde Baru dengan Islam pada periode 1990-an pada umumnya, dan dalam perbaikan citra ABRI di hadapan sipil yang mayoritas Islam pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- _____. *PPP, Pelopor Menegakkan Etika Politik*. Jakarta: DPP PPP. 1997.
- Afandi, Afri. *Rakyat Jadi Raja Lagi: Esai-Esai Politik*. Jakarta: PT LKiS Pelangi Aksara. 2005.
- Bourchier, David, dkk. *Bunga Rampai Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-199*. Jakarta: Grafiti. 2006.
- Cahyono, Heru. *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan. 1998.
- Departemen Agama RI. *Perjalanan Ibadah Haji Pak Harto*. 1993.
- Fatah, Eep Saefulloh. *Zaman Kesempatan*, Jakarta: Pustaka Mizan. 2000.
- Haramain, A. Malik. *Gus Dur, Militer, dan Politik*. Jakarta: PT LKiS Pelangi Aksara. 2004.
- Hisyam, Muhammad. *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2003.
- Hisyam, Usamah. *Feisal Tanjung: Terbaik Untuk Rakyat, Terbaik Bagi Abri*, Jakarta: Dharmapena. 1999.
- Ida, Laode. *Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara*. Jakarta: Sinar Harapan. 1996.
- K.H., Ramadhan. *Soemitro, Mantan Pangkopkamtib: dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994.
- Kanumoyoso, Bondan. *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia: Menguatnya Peran Ekonomi Negara*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan. 2001.
- Karim, Muhammad Rusli. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Yogya: Tiara Wacana. 1999.
- Karim, Muhammad Rusli. *Peranan ABRI dalam Politik*. Jakarta: Penerbit Haji Masagung. 1989.
- Komite Nasional Lutheran World Federation. *Luther dan Pendidikan*. Medan: Percetakan Tried Rogate. 2012.

- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana. 2003.
- Lay, Cornelis. *Melawan Negara: PDI 1973-1986*. Yogyakarta: Research Center for polgov, JPP UGM. 2010.
- Matanasi, Petrik. *Prajurit-prajurit di Kiri Jalan*. Jakarta: Trompet Book. 2012.
- Notosusanto, Nugroho. *Hubungan Sipil-Militer dan Dwifungsi ABRI*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI. 1974.
- Nugroho, Taufik. *Pasang Surut Hubungan Islam dan Negara Pancasila*. Yogyakarta: Padma. 2003.
- Pambudi. *Kalau Prabowo Jadi Presiden*. Jakarta: Penerbit Narasi. 2009.
- Poesponegoro, Marwati Djoenod dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008.
- Purwanto, Wawan H. *TNI dan Tata Dunia Baru Sistem Pertahanan*. Jakarta: CMB Press. 2011.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi. 2008.
- Said, Salim. *Militer Indonesia dan Politik, Dulu, Kini dan Kelak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Silalahi, TB. *Anak Hadal TB Silalahi: Sebuah Biografi*. Jakarta: Yayasan Soporurung. 1996.
- Soempeno, Femi Adi. *Prabowo: Dari Cijantung Bergerak ke Istana*. Jakarta: Galangpress Group. 2009.
- Syaifullah. *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 1997
- Tanjung, Feisal. *ABRI-Islam Mitra Sejati*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1997.
- Wadong, Maulana Hasan. *Islam dan TNI-POLRI Dalam Reformasi Ideologi Politik*. Jakarta: PT Grassindo. 2000.
- Zen, Kivlan. *Konflik dan Integrasi TNI-AD*. Jakarta: Institute For Studies Police.

Majalah dan Surat Kabar

Berita Yudha No.82 TH ke-XXVIII. Sabtu 22 Mei 1993.

Forum Keadilan No. 11 Tahun II. 16 September 1993.

Harian Bersenjata. Sabtu, 22 Mei 1993.

Kompas. Sabtu 22 Mei 1993. '*Jenderal TNI Feisal Tanjung dilantik menjadi pangab*'. Hal. 1 dan 11.

Liddle, William. *Indonesia's Threefold Crisis*. Journal Of Democracy. Vol.3. No.4. October 1994.

Majalah Berita Mingguan Tempo. *Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1985-1986*. Jakarta: PT Pustaka Grafitipers. 1986.

Majalah Legiun Veteran RI. Vol.2 No.7. Maret. Sibolga. 2012.

Majalah Tempo Edisi Khusus Ali Moertopo. 14-20 Oktober 2003.

Pikiran Rakyat. Sabtu 22 Mei 1993.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 0066B/UN39.12/KM/2016
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian
untuk Penulisan Skripsi

6 Januari 2016

Yth. Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Sufila Iswanti
Nomor Registrasi : 4415091382
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP : 083807076136

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka Penulisan Skripsi. Skripsi tersebut dengan judul :

"Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung : Mempererat Hubungan ABRI Dengan Golongan Islam (1993-1998)"

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Kaprog / Jurusan Sejarah

Drs. Syaifullah
NIP. 195702161984031001



*Building
Future
Leaders*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 0066A/UN39.12/KM/2016
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian
untuk Penulisan Skripsi

6 Januari 2016

Yth. Kepala Pusat Penerangan MABES ABRI
Cilangkap, Jakarta Timur

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Sufila Iswanti
Nomor Registrasi : 4415091382
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP : 083807076136

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka Penulisan Skripsi. Skripsi tersebut dengan judul :

"Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung : Mempererat Hubungan ABRI Dengan Golongan Islam (1993-1998)"

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Kaprog / Jurusan Sejarah



Drs. Syaifullah
NIP. 195702161984031001



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982

BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180

Bag. UHTP : Telp. 4893726, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, HUMAS : 4898486

Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 2769B/N39.12/LT/2013

Lamp. : -

16 Oktober 2013

Hal : **Permohonan Izin Penelitian untuk Skripsi**

Yth. **Pusat Sejarah TNI**

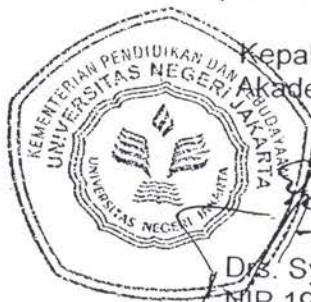
Kami mohon kesediaan Saudara, untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : **Sufila Iswanti**
Nomor Registrasi : **4415091382**
Program Studi : **Pendidikan Sejarah**
Fakultas : **Ilmu Sosial**
Untuk Mengadakan : **Penelitian untuk Skripsi**

Di : **Pusat Sejarah TNI**

Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul:
"Feisal Tanjung dalam Rekonsiliasi Hubungan ABRI dengan Umat Islam (1993-1998)"

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan,

Dr. Syaifullah
NIP 195702161984031001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Kaprog / Jurusan Sejarah

Feisal Tanjung dilantik jadi Pangab

JAKARTA, (AB). Presiden Soeharto melantik Jenderal TNI Feisal Tanjung (54) sebagai Panglima ABRI di Istana Negara, Jumat, menggantikan Jenderal TNI Edi Sudradjat yang dalam susunan kabinet kini dipercaya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Jenderal Feisal Tanjung menjadi Pangab berdasarkan Keputusan Presiden No. 199/M/1991 tertanggal 21 Mei. Dijadwalkan serah terima jabatan Panglima ABRI dari Jenderal TNI Edi Sudradjat kepada Jenderal Feisal Tanjung dilaksanakan Sabtu pagi ini di Mabes ABRI Cilangkap, Jakarta Timur.

Upacara pelantikan Pangab kemarin berlangsung singkat, sederhana namun khidmat. Bertindak sebagai saksi Menko Polkam Soesilo Soedarmanto dan Menhankam Jenderal TNI Edi Sudradjat.

Hadir antara lain Ibu Tien Soeharto, Wakil Presiden dan Ibu Try Sutrisno, pimpinan lembaga tinggi negara, beberapa menteri, para Kepala Staf Angkatan dan Kapolri, para perwira tinggi ABRI dan pejabat tinggi lainnya serta keluarga Pangab baru.

Pangab baru sebelumnya menjabat Kasum ABRI dan jabatan itu diserahkan kepada Letjen TNI HDL Mantini, baru-baru ini, bersamaan dengan penyerahan jabatan Kassospol ABRI dari Letjen TNI Harsudiono Hartas kepada Letjen TNI Hariyanto PS.

Riwayat

Jenderal TNI Feisal Tanjung lahir di Tarutung 17 Juni 1939, beragama Islam, kawin dan dikaruniai tiga anak. Pendidikan umum SD, SMP dan SMA. Pendidikan militernya antara lain AMN 1961, Sarbang IF 1962, Suslapa 1985, Seskoad di Jerman 1972, Seskogab 1977 dan Lemhanas 1982. Pendidikan spesialisasi antara lain Dasar Para, Komando, Kupatu IF, Sandhi Yudha, IDMC USA, Tar P4 di BP-7 Pusat.

Mampu berbahasa Inggris dan Jerman, Feisal Tanjung menyandang pangkat Brigjen TNI mulai 1 Mei 1982, Mayjen TNI 1 Juni 1985 dan Letjen TNI 1 Juli 1992.

Tanda jasa yang dimilikinya, antara lain Satya Lencana GOM III dan VII, Satya Lencana Satya Dharma, Satya Lencana Wira Dharma, Satya Lencana Penegak, Satya Lencana Santhi Dharma, Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Dwija Sista, Satya Lencana Kepahlawanan (Malaysia), Bintang Narayana, Bintang Pratama. Jabatan yang pernah dipegangnya antara lain, Dan Den 41 RPKAD, Dan Karia Yudha 1 RPKAD, Dan Ops Linud RPKAD, Dosen Seskoad, Kasbrigif Linud 17 Kostrad, Wadan Brigif Linud 17 Kostrad, Dirlet Kekar Malindo 1, Asops Kas Kostrad, Kas Kopur Linud Kostrad, Pangkopur Linud Kostrad, Dan Pus IF TNI-AD, Pangdam VI Tandjungpura, Dan Seskoad, Kasum ABRI.

Usai pelantikan Presiden Soeharto memberikan ucapan selamat dan menyempatkan diri berbincang dengan Pangab baru serta Wapres Try Sutrisno dan Menhankam Jenderal TNI Edi Sudradjat.

(Bersambung ke Hal. X kol. 4)



PANGILMA ABRI YANG BARU: Presiden Soeharto menyolami Panglima ABRI yang baru, Jenderal TNI Feisal Tanjung yang diistilahi dalam acara ramah tamah, sesuai pelantikan Panglima ABRI di Istana Negara Jumat kemarin. (Foto: AB/m.sahel/1.5)

ABRI tak pernah kekurangan personil untuk calon pimpinan nasional

Jakarta, (AB).— ABRI tidak pernah kekurangan personilnya untuk mengisi jabatan calon pimpinan nasional. Tinggal lagi kesempatan, namun itu semua juga harus secara konstitusional.

Demikian Menhankam Jenderal TNI Edi Sudradjat dan Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung mengemukakan saat pertanyaan wartawan usai pelantikan Pangab kemarin di Istana Negara.

Menhankam Jenderal TNI Edi Sudradjat tidak setuju dengan pendapat ABRI kini kekurangan calon pimpinan nasional. "Tidak kurang, banyak. Tinggal diberi kesempatan," tegasnya.

Apa kesempatan itu harus direbut, tanya wartawan. "Diupayakan," tegasnya.

Sementara itu Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung membantah anggapan ABRI kurang memiliki calon pimpinan nasional. "Kalau konstitusi yang memilih kita, ya bisa saja."

Jadi, kesempatan itu akan tetap ada, tanya wartawan. "Ya, tetap ada. Karena kita ini kan negara kekeluargaan. Kalau MPR atau Murnas memilih, ABRI harus siap," tandasnya.

Pangab juga membantah adanya anggapan proses kaderisasi dalam tubuh ABRI kini memasuki tahap yang berat. "Proses kaderisasi itu akan terus dibina untuk mencapai sesuatu yang baik, dan ini harus kerja keras."

Prioritas

Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung mengatakan peningkatan mutu sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan prajurit melalui koperasi akan dilaksanakannya dengan baik. "Ini prioritas dan memang berat."

Pangab menilai jabatan baru yang diembannya merupakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh pemerintah kepada ABRI. "Sungguh ini merupakan suatu kenormaan bagi saya," ujarnya.

Ketika ditanya mengapa begitu cepat ia menggantikan Jenderal TNI Edi Sudradjat, Feisal Tanjung meminta itu jangan ditanyakan kepadanya.

Apa yang akan dilakukan bapak? tanya wartawan yang dijawab, "menemukan apa yang telah diprogramkan oleh Pak Edi".

Jalal Tuti Wuri Handayani? "Ya, correct. Saya setuju. Karena salah satu azas kepemimpinan ABRI adalah Tuti Wuri Handayani di samping Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mbangun Karso dan lain-lain."

Menjawab pertanyaan bahwa salah satu tugas yang terberat adalah membangun citra Polri, menurut Jenderal Tanjung tidak hanya citra Polri tetapi citra

bangsa. "Kita lihat kesalahan di jalan raya bukan kesalahan polisi saja. ABRI kita bangun. Dan disiplin ABRI tidak menurun."

Ketika ditanya mengenai pernyataan Presiden yang mengatakan tugas berat nuwasi diri, menurut Pangab memang kita harus selalu mawas diri dan implementasinya juga, ditanamkan oleh TNI-AD. "Bisa, pelajar, profesional, main, bukan Sapta Marga, Sunyob, dan lain-lain, itu semua dipegang teguh."

Menjawab pertanyaan, Jenderal Tanjung mengatakan ia menandatangani menjadi Pangab baru-baru saja, setelah Pak Edi (Pangab waktu itu, red) bicara kepada pers.

Tidak ada tanda-tanda sebelumnya, desak wartawan. "Se... malah tahu dari kalfan, koran lebih tahu," ujarnya.

Normai

Menhankam Jenderal TNI Edi Sudradjat mengatakan pergantian Pangab sebagai sesuatu yang normal. Organisasi ABRI begitu, tiap kali pergantian tidak ada masalah, sebab semuanya menurut tata-tan yang berlaku.

Menjawab pertanyaan usai pelantikan Pangab kemarin di Istana Negara, apakah waktu tiga bulan tidak terlalu cepat? Edi mengatakan itu normal. "ABRI kan begitu. Apa bedanya lima tahun dengan tiga bulan. Sama saja, yang penting tanggung jawabnya. Ukurannya di situ."

Ada kesan di luar kok begitu cepat. Menhankam mengatakan itu kan kesan. Kesan bukan ukuran. Bisa ada seribu kesan.

Menjawab pertanyaan selama tiga bulan apa yang sudah dilakukan, Jenderal Edi mengatakan yang dilakukannya adalah memelihara kekompanan. Program tetap berjalan, dan semua sasaran dicapai.

Tergantung kebutuhan

Ditanya tentang masa jabatan Pangab, Menteri Edi mengatakan

semua itu menurut kebutuhan. Organisasi ABRI dibentuk untuk mencapai tujuan, bukan buat orang. Jangan lupa itu. "Kalian juga menafsirkannya buat orang," ujarnya.

Ketika ditanya apakah tiga bulan dirasakan cukup, menurut Edi hal itu dilihat kebutuhannya dan kepentingannya. "Saya kan harus jadi Menhankam," tegas Edi.

Program selama tiga bulan sudah tercapai semua dan yang menonjol adalah penggantian Kepala Staf dan Kapolri beberapa waktu lalu. Kepada Pangab baru Jenderal Edi berpesan untuk selalu menjaga kekompanan, dan menjaga ABRI agar tetap menjadi tentara nasional yang mampu mengabdikan kepada bangsa, negara dan masyarakat.

Jenderal Edi bersyukur jika ada anggapan bahwa pernyataan-pernyataan selama tiga bulan menjadi Pangab membuat masyarakat lega. "Ya Alhamdulillah, terserah masyarakat."

(3.13/2.1)

Feisal Tanjung.....

(Sambungan dari Hal. I)

Tepat

Menko Polka, Soesilo Soedarmanto atas pertanyaan wartawan mengatakan terpisahnya Jenderal TNI Feisal Tanjung sebagai Panglima ABRI tepat, karena pengabdianannya selama ini.

"Pengalamannya lengkap sebagai guru, dosen Seskoad, dan perwira lapangan lainnya serta pendidikannya baik luar maupun dalam negeri, merupakan syarat yang pas sebagai pimpinan ABRI. Begitu juga keluarganya bisa menjadi panutan. Ini penting, karena pemimpin itu berfungsi sebagai guru dan juga komandan. Ini pas untuk figur Pak Feisal," kata Soesilo beralasan.

Mengenai jabatan Jenderal Edi sebagai Pangab yang tidak lama, menurut Menko Polkam tidak apa-apa.

Sementara itu Kepala Staf TNI-AD Letjen TNI Wisnomo Arismunandar mengatakan Feisal Tanjung merupakan perwira pa-

ling senior, jadi ia pantas menjadi Panglima ABRI.

Nyonya Nasrowidah, istri Feisal Tanjung atas nyataan wartawan menyatakan syukurnya pemerintah memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengemban tugas yang begitu berat.

Tidak banyak yang diungkapkan kapannya pertama kali bertemu dengan pemuda Feisal. Pertama kali bertemu Pak Feisal, saya kira banyak yang dapat saya katakan. Saya waktu itu masih ruskan kuliah di ked-

Unpad. Pacarannya lew waktu itu memang Feisal, diujung sekolah sesko angk-

rat di Jerman Barat dua Kami bertemu pada saat-

Selama dua tahun itu cuma tiga minggu," ken-

Setelah selesai pendid-

ABRI tak pernah... (Sambungan dari Hal. I)

Sudradjat mengatakan pergantian Pangab sebagai sesuatu yang normal. Organisasi ABRI begitu, tiap kali pergantian tidak ada masalah, sebab semuanya menurut tata-tan yang berlaku.

Menjawab pertanyaan usai pelantikan Pangab kemarin di Istana Negara, apakah waktu tiga bulan tidak terlalu cepat? Edi mengatakan itu normal. "ABRI kan begitu. Apa bedanya lima tahun dengan tiga bulan. Sama saja, yang penting tanggung jawabnya. Ukurannya di situ."

Ada kesan di luar kok begitu cepat. Menhankam mengatakan itu kan kesan. Kesan bukan ukuran. Bisa ada seribu kesan.

Menjawab pertanyaan selama tiga bulan apa yang sudah dilakukan, Jenderal Edi mengatakan yang dilakukannya adalah memelihara kekompanan. Program tetap berjalan, dan semua sasaran dicapai.

Tergantung kebutuhan

Ditanya tentang masa jabatan Pangab, Menteri Edi mengatakan

semua itu menurut kebutuhan. Organisasi ABRI dibentuk untuk mencapai tujuan, bukan buat orang. Jangan lupa itu. "Kalian juga menafsirkannya buat orang," ujarnya.

Ketika ditanya apakah tiga bulan dirasakan cukup, menurut Edi hal itu dilihat kebutuhannya dan kepentingannya. "Saya kan harus jadi Menhankam," tegas Edi.

Program selama tiga bulan sudah tercapai semua dan yang menonjol adalah penggantian Kepala Staf dan Kapolri beberapa waktu lalu. Kepada Pangab baru Jenderal Edi berpesan untuk selalu menjaga kekompanan, dan menjaga ABRI agar tetap menjadi tentara nasional yang mampu mengabdikan kepada bangsa, negara dan masyarakat.

Jenderal Edi bersyukur jika ada anggapan bahwa pernyataan-pernyataan selama tiga bulan menjadi Pangab membuat masyarakat lega. "Ya Alhamdulillah, terserah masyarakat."

(3.13/2.1)

Presiden Lantik Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung

Penggantian Pangab Sesuai Tatanan ABRI

Jakarta, Mei (BY)

Presiden Soeharto, hari Jum'at, di Istana Negara, Jakarta, melantik Jenderal TNI Feisal Tanjung menjadi Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) menggantikan Jenderal TNI Edi Sudradjat yang selama beberapa bulan ini merangkap dua jabatan yaitu Menhankam dan Pangab.

Acara yang hanya berlangsung sekitar 10 menit itu diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden No. 199/M/1993 tertanggal 21 Mei oleh Sekmil Kepresidenan Mayjen TNI Syaukat Banjaransari mengenai pemberhentian Edi Sudradjat sebagai Pangab dan pengangkatan Tanjung.

Presiden Soeharto kemudian melakukan pengambilan sumpah terhadap Tanjung yang sebelum-

nya menduduki jabatan Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI. Acara pelantikan ini diakhiri dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh korps Musik ABRI.

Kepala Negara, Ibu Tien Soeharto, Wapres Try Sutrisno dan Ibu Tuti Sutrisno, Ketua MPR/DPR Wahono serta pada undangan kemudian memberikan ucapan selamat kepada Tanjung yang didampingi istri.

Menko Polkam Soesilo Soedarman dalam komentarnya mengenai pergantian jabatan Pangab mengatakan, Pangab baru merupakan perwira tinggi ABRI yang memiliki pengalaman dan latar belakang pendidikan formal yang lengkap serta didukung oleh keluarga yang dapat dijadikan pa-

nutan bagi generasi muda.

"Pak Feisal memiliki pengalaman lapangan yang lengkap serta pernah menjadi dosen pengajar di Seskoad hingga ia merupakan figur yang tepat untuk menduduki jabatan strategis ini," kata Soesilo yang pernah menjadi atasan Feisal Tanjung selama Menko Polkam itu menjabat sebagai Pangkowilhan di Sumatera.

Dikatakannya, alih generasi di lingkungan ABRI saat ini merupakan hasil dari usaha yang pernah dibina oleh generasi perwira ABRI angkatan sebelumnya yang menginginkan agar ABRI dipimpin oleh perwira-perwira tinggi yang berkualitas serta memiliki dedikasi yang tinggi.

"Kami dulu menyiapkan perwira-perwira tinggi ABRI melalui jenjang

pendidikan Seskogab pada tahun 1973 hingga 1975. Jadi ini merupakan usaha yang dibina dua puluh tahun lalu," ujar Menko Polkam.

Komentar Edi

Sementara itu Menhankam Edi Sudradjat, sesuai acara pelantikan Pangab mengatakan, pergantian jabatan Pangab ini merupakan hal yang normal dan sesuai dengan tatanan yang berlaku dalam organisasi ABRI.

"Bagi ABRI, tidak ada bedanya lima tahun atau tiga bulan dalam suatu jenjang jabatan. Yang penting kan rasa tanggungjawab pejabat yang bersangkutan selama memegang jabatan. Ukurannya di situ," kata Edi mengomentari masa jabatannya sebagai Pangab yang

Ke halaman X kol 4-5

★ Presiden

relatif singkat (tiga bulan) itu.

Dikatakannya, selama masa kepemimpinannya itu, ia merasa berhasil menjaga kekompakan di lingkungan ABRI serta menjalankan program kerja dan sasaran yang harus dicapai.

Kepada Pangab yang baru, Menhankam menga-

Dari hal I

takan sempat berpesan untuk tetap menjaga kekompakan ABRI serta sikap dan sifat perjuangan ABRI sebagai tentara nasional yang mengabdikan kepada bangsa dan negara.

Selesai dilantik dan diambil sumpahnya, Feisal Tanjung menjawab wartawan mengatakan, ia akan meneruskan apa yang telah diprogramkan oleh Edi Sudradjat.

"Jadi Tut Wuri Handayani?" tanya wartawan. "Ya, correct. Saya setuju. Karena salah satu azas kepemimpinan ABRI adalah Tut Wuri Handayani disamping Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mbangun, Karso dan azas lainnya yang kesemuanya ada 11 azas.

Ketika ditanya apa yang terberat yang akan ditangani Pangab, Feisal mengatakan, peningkatan mutu dan sumber daya manusia.

"Itu yang akan kita tangani dengan baik," katanya. Demikian pula upaya akan ditempuh peningkatan kesejahteraan pram-

Peran Sospol ABRI "Tut Wuri Handayani"

Presiden Lantik Pangab Jenderal Feisal Tandjung

JAKARTA, (PR).-

Presiden Soeharto di Istana Negara, Jumat (21/5), melantik dan mengambil sumpah Jenderal TNI Feisal Tandjung menjadi Panglima ABRI menggantikan pejabat lama Jenderal TNI Edi Sudradjat.

Hadir dalam kesempatan itu Ibu Tien Soeharto, Wapres dan Ny. Try Sutrisno, Pimpinan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, para Menteri, Kasta Angkatan dan Kapoli serta pejabat-pejabat tinggi lainnya.

Pengangkatan Jenderal TNI Feisal Tandjung sebagai Panglima ABRI dengan kedudukan setingkat Menteri Negara itu, berdasarkan Keputusan No. 199/M/1993 tertanggal 21 Mei 1993.

Keppres itu juga memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Edi Sudradjat dari jabatannya sebagai Panglima ABRI, disertai ucapan terima kasih atas jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut.

Upacara pelantikan itu diawali dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pengambilan sum-

pah jabatan Panglima ABRI oleh Presiden, Jenderal TNI Feisal Tandjung, se usai diambil sumpahnya sebagai Panglima ABRI, menandatangani berita acara pengangkatan sumpah jabatan yang disaksikan Menko Polkam, Soesilo Soedarmad dan Menhankam, Edi Sudradjat.

Sebelum upacara diakhiri dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Presiden dan Ibu Tien Soeharto, Wapres dan Ny. Try Sutrisno serta para undangan memberikan ucapan selamat kepada Jenderal TNI Feisal Tandjung yang didampingi istrinya.

Kepemimpinan ABRI

Menjawab pertanyaan wartawan, Feisal Tandjung mengatakan bahwa ia akan meneruskan program-program yang telah dirintis Jenderal TNI Edi Sudradjat.

Khususnya mengenai peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik, Feisal Tandjung mengatakan bahwa ABRI akan melanjutkan tugasnya sebagai kekuatan sopol dan "tut wuri handayani".

Ketika ditanya apa yang terberat untuk ditangani, mantan Komandan Seskoab itu menyebutkan pening-

katan mutu sumber daya manusia, termasuk peiringkatkan kesejahteraan prajurit melalui koperasi.

Menurut Feisal Tandjung, salah satu tugasnya yang terberat bukan hanya membangun citra Polri, tetapi juga citra bangsa. Ditanya tentang adanya pernyataan Presiden bahwa kita harus mawas diri, Feisal Tandjung menyebutkan bahwa ABRI pun harus selalu mawas diri. Untuk itu, implementasi yang telah dicanangkan oleh TNI-AD berusaha menjadi prajurit pejuang, profesional, menegakkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

"Itu semua kita pegang teguh," tegasnya.

Feisal Tandjung yang dilahirkan 17 Juni 1939 di Tarutung, Sumut, sebelumnya menjadi Kepala Staf Umum ABRI. Ia lulus AMN tahun 1961 dengan pangkat Letda Inf. Tahun 1982 ia berpangkat Brigjen TNI. Tahun 1985 naik pangkat menjadi Mayjen TNI, dan tahun 1992 menjadi Letjen TNI.

Ia yang menguasai bahasa asing Inggris dan Jerman itu, memiliki 12 tanda jasa. Jabatan yang pernah dipikanya antara lain Dan Dan 41

RPKAD, Dan Ops Linud RPKAD, Dosen Seskoab, Kasbrigif Linud 17 Kostrad, Dan Brigif Linud 17 Kostrad, Asops Kas Kostrad, Kas Kopur Linud Kostrad, Pangkorpor Linud Kostrad, Pangdam VI/Tanjung Pura serta Dan Seskoab.

Feisal Tandjung semakin dikenal masyarakat setelah ditunjuk oleh Kepala Negara untuk mengetuai Dewan Kehormatan Militer (DKM) dalam mengusut peristiwa Dili 12 November 1991.

Tidak ada masalah

Menko Polkam, Soesilo Soedarmad menilai, Feisal Tandjung yang memiliki pengalaman dan latar belakang pendidikan formal yang lengkap, serta didukung oleh keluarga yang dapat dijadikan anutan bagi generasi muda, itu semua merupakan syarat yang pas sebagai pimpinan ABRI.

"Pak Feisal memiliki pengalaman lapangan yang lengkap serta pernah menjadi dosen Seskoab, hingga ia merupakan figur yang tepat untuk menduduki jabatan strategis ini,"

(Bersambung ke hal 15 kol 8)

Dikotomi ABRI-Sipil?

Pada awal Orde Baru, ABRI memang merupakan kekuatan politik yang menentukan. Semua instansi kunci dipegang ABRI dan kekuatan-kekuatan sipil tak diberi kesempatan untuk berkembang. Malah ruang gerak mereka semakin sempit. Golkar dibina ABRI bukan untuk menyalurkan kehendak rakyat kepada pemerintah, tapi sebagai alat untuk menjamin kemenangan dalam pemilu. Sedangkan parpol, seperti Parmusi dan PNI, mengalami intervensi yang dilakukan perwira-perwira intel dan bertujuan untuk memastikan bahwa pemimpin-pemimpinnya "sesuai" dan dapat dikendalikan.

Bagaimana keadaannya pada awal 1990-an? Memang, kedudukan parpol tidak banyak berbeda. Seperti halnya Parmusi dan PNI dulu, sekarang pun PDI tampaknya tidak dibenarkan memilih pemimpin sendiri jika pemimpin itu tidak mendapat "lampu hijau" lebih dahulu. Apalagi kalau lampu itu sudah "merah". Seperti PDI, PPP juga bebas memilih pemimpinnya sendiri asal pilihan itu "betul".

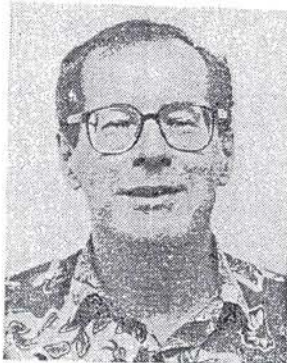
Namun, suasana politik secara umum pada 1990-an sangat berbeda ketimbang 1960-an. Dulu, suara pemerintah dan suara ABRI adalah seirama saja. Jika orang berbicara tentang pemerintah pada waktu itu, maksudnya ABRI. Dan, jika menyebut ABRI, maksudnya pemerintah. Tapi, sekarang, pemerintah bermakna pemerintah, dan ABRI bermakna ABRI.

Perubahan itu dapat dilihat dalam hal pemilihan ketua umum Golkar yang sedang banyak disoroti. Dulu, pimpinan Golkar disepakati secara bersama oleh pemerintah dan ABRI. Tidak ada calon "istana" ataupun calon "Mabes". Tapi, sekarang, kita mendengar nama-nama yang dikemukakan pihak yang dapat dikatakan mewakili "pemerintah", sedangkan nama lain dikemukakan oleh pihak yang mewakili ABRI.

Dalam hal ini, kita mungkin teringat akan politik di zaman Bung Karno. Waktu itu, suara pemerintah dan suara ABRI belum tentu senada, malah sering bertentangan. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa presiden dan ABRI selalu berkonfrontasi secara langsung. Sebaliknya, Presiden Sukarno berusaha untuk merangkul jenderal-jenderal tertentu dan meletakkan mereka di posisi-posisi penting dalam ABRI. Dengan demikian, dikotomi ABRI-Sipil tidak begitu jelas. Ada jenderal-jenderal yang dekat dengan istana dan, sebaliknya, ada yang kurang dekat.

Sekarang, dikotomi ABRI-Sipil tidak setajam dulu, apalagi kalau diperhitungkan bukan saja peran ABRI aktif tetapi juga keluarga besar ABRI. Dulu, hampir tidak ada jenderal purnawirawan karena, pada waktu itu, kebanyakan perwira Angkatan 45 belum berumur 55 tahun dan masih aktif walaupun banyak yang dikarya-

Harold Crouch
Pengamat Politik dan Militer
dari The Australia National
University



kan. Tapi, sejak akhir 1970-an, semakin banyak perwira menjadi purnawirawan. Justru jenderal-jenderal purnawirawan itu yang paling berani dan lantang mengeluarkan pendapatnya. Dan, pendapat-pendapatnya belum tentu sama dengan penguasa ataupun pimpinan ABRI, sehingga ada di antara mereka yang dianggap *dissident*.

Dikotomi ABRI-Sipil juga semakin pudar dalam hal pemilihan gubernur daerah dan ketua-ketua DPRD. Ada kalanya, pendapat dua calon yang sama-sama berpangkat jenderal, yang satu didukung F-ABRI dan yang lain didukung pihak sipil. Di daerah lain, F-ABRI mendukung calon sipil dari Golkar, tapi di daerah lain lagi menentang calon Golkar. Dibanding suasana politik beberapa tahun lalu, percaturan politik di tingkat daerah memang semakin "kompleks" dan tak menentu.

Dulu, gubernur selalu didrop pusat. Sekarang, sering terjadi persaingan yang melibatkan unsur ABRI dan Sipil.

Mungkin ada pihak yang tidak begitu suka "kekacauan" seperti itu dan merindukan zaman serba tertib kembali seperti sebelumnya, ketika dikotomi ABRI-Sipil cukup jelas. Tapi, di segi lain, perkembangan-perkembangan baru itu patut disambut baik sebagai langkah positif ke arah demokratisasi. Sistem demokrasi memang kurang tertib dan kurang teratur. Tak ada lampu hijau dan lampu merah dalam pemilihan yang demokratis. Pemimpin-pemimpin harus dipilih secara bebas, apakah pemenangnya itu sipil atau ABRI.

Sudah tentu, kita tak dapat mengatakan bahwa dikotomi ABRI-Sipil sudah lenyap sama sekali. Perwira-perwira ABRI bukanlah individu yang boleh bertindak secara sendiri-sendiri dalam politik. Sebagai perwira ABRI, mereka tetap tunduk kepada disiplin militer. Justru doktrin ABRI sendiri yang menetapkan tanggung jawab ABRI dalam memimpin masyarakat, apakah berdasar asas *ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa* ataupun *tut wuri handayani*. Artinya, ABRI yang menuntun orang sipil, bukan orang sipil yang menuntun ABRI.

Masalahnya sekarang — sudah tentu melalui kacamata seorang pengamat asing — adalah sejauh mana ABRI membatasi diri dalam bidang politik, supaya golongan sipil dapat bergerak secara leluasa. Kelihatan sekarang bahwa ABRI sangat aktif dalam Golkar, sehingga banyak sekali anggota keluarga besar ABRI dipilih sebagai pemimpin Golkar di daerah. Apakah tujuannya sekadar untuk bekerja sama dengan sipil dalam tubuh Golkar, ataukah ABRI ingin merebut pimpinan Golkar agar organisasi itu dikuasainya? Seandainya pihak ABRI masih yakin, hanya seorang perwira ABRI saja yang sesuai untuk memimpin Golkar nanti, sudah tentu dikotomi ABRI-Sipil masih belum hilang. □

RIWAYAT HIDUP



Sufila Iswanti, lahir di Kebumen, 10 Juli 1990, menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 02 Plumbon, Kebumen, Jawa Tengah. Kemudian melanjutkan di SMP YP IPPI Petojo dan Jurusan Akuntansi d SMKN 11

Jakarta. Kuliah di Jurusan Sejarah FIS UNJ angkatan 2009 melalui jalur seleksi UMB. Penulis pernah aktif di BEM dan juga lembaga dakwah ICA FIS UNJ. Saat ini tinggal di Depok

Tidak ada gading yang tak retak. Oleh karenanya semua saran dan koreksi pada penulis silakan disampaikan melalui email: sufila.sejarah@gmail.com.